

**PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP *INTELLECTUAL*
CAPITAL DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

BANGKIT NUGROHO
NIM. C2C005245

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Bangkit Nugroho
Nomor Induk Mahasiswa : C2C005245
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE* PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Dosen Pembimbing : Dr. H. Agus Purwanto, MSi., Akt.

Semarang, 6 Januari 2011

Dosen Pembimbing,



(Dr. H. Agus Purwanto, MSi., Akt.)

NIP. 19680827 199202 1001

PERSETUJUAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Bangkit Nugroho
Nomor Induk Mahasiswa : C2C005245
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE* PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Dosen Pembimbing : Dr. H. Agus Purwanto, M.Si., Akt.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 18 Januari 2011

Tim Penguji :

1. Dr. H. Agus Purwanto, M.Si., Akt. (.....)

2. Dr. H. Sugeng Pamudji, M.Si., Akt. (.....)

3. H. Warsito Kawedar, SE., M.Si., Akt. (.....)



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. The background is a light green rectangular area.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Bangkit Nugroho, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “**Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap *Intellectual Capital Disclosure* Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 30 Desember 2010

Yang membuat pernyataan,



Bangkit Nugroho
NIM. C2C005245

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Perjuanganku yang tak kenal lelah, ikhtiar sampai titik darah penghabisan, telah menghasilkan sebuah karya ilmiah yang bernama “Skripsi”. Telah kukerahkan jiwa ragaku yang tulus dan semoga *lillahi Ta ‘Ala*. Kupersembahkan karya ini kepada ibuku dan bapakku sebagai bentuk darma bakti dan rasa sayangku kepada mereka. Selanjutnya, skripsi ini aku dedikasikan untuk khasanah ilmu pengetahuan Indonesia, melalui kampus almamaterku, Universitas Diponegoro, sebagai salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian.

MOTTO PENULIS

➤ Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

➤ *Lakon menange keru.*

Don't misunderstand. Jika anda gagal, janganlah berputus asa tetapi yakinlah suatu saat kelak anda akan berhasil (*keywords*: kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda).

➤ Janganlah ikhlas menerima sebelum terjadi ketetapan/takdir tetapi bersemangatlah engkau *mumpung* masih ada kesempatan berikhtiar, karena sesungguhnya yang seperti itu hanya tepat untuk menghadapi takdir yang telah terjadi.

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate the relationship between corporate governance structures and intellectual capital disclosure (ICD). The research problems is how the influences of proportion of independent non-executive director, share concentration, size of audit committee, frequency of audit committee meetings, external auditor, managerial ownership and institution ownership on intellectual capital disclosure.

This research use samples of 36 listed firms on Indonesian Stock Exchange in 2008. The sampling method is purposive sampling. The purposive sampling criteria are used in this research are companies which fully publish annual report contains data about independent commissioners, share ownership $\geq 5\%$, number of audit committee, frequency of audit committee meetings, independent auditor, managerial ownership, institution ownership. Data is collected by documentation and content analysis method. Then dependent variables are analyzed by factor analysis to determine new one dependent variable as result of summarization of variables dependent. Furthermore, research data are analyzed by multiple regression analysis.

Results of the analysis based on the measure of intellectual capital disclosure (ICD), it indicates there are significantly influences between all the corporate governance structures except for proportion of independent non-executive directors, size of audit committee and external auditor on intellectual capital disclosure. The proportion of independent non-executive directors does not significantly influence to ICD, so H_1 rejected. Share concentration significantly influences to ICD, so H_2 accepted. Size of audit committee does not significantly influences to ICD, so H_3 rejected. Frequency of audit committee meetings significantly influences to ICD, so H_4 accepted. External auditor does not significantly influences to ICD, so H_5 rejected. Management ownership significantly influences to ICD, so H_6 accepted. Institutional ownership significantly influences to ICD, so H_7 accepted.

Keywords: corporate governance, intellectual capital disclosure, annual report, content analysis.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menginvestigasi hubungan antara variabel-variabel *corporate governance* dan *intellectual capital disclosure* (ICD). Masalah penelitiannya adalah bagaimana pengaruh proporsi komisaris independen konsentrasi saham, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, auditor eksternal, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi terhadap *intellectual capital disclosure*.

Penelitian ini menggunakan sampel 36 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Kriteria *purposive sampling* yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap, yang memuat data tentang komisaris independen, kepemilikan saham sebesar $\geq 5\%$, komite audit, jumlah rapat komite audit, auditor independen, jumlah kepemilikan saham oleh manajemen serta jumlah kepemilikan saham oleh institusi. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan *content analysis*. Kemudian variabel dependen dianalisis dengan analisis faktor untuk menentukan satu variabel dependen yang baru sebagai hasil ringkasan variabel-variabel dependen. Selanjutnya, data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil dari analisis yang didasarkan pada pengukuran *intellectual capital disclosure* (ICD), mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara semua faktor *corporate governance* kecuali proporsi komisaris independen, ukuran komite audit dan auditor eksternal terhadap ICD. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap ICD sehingga H_1 ditolak. Konsentrasi saham berpengaruh signifikan terhadap ICD sehingga H_2 diterima. Ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ICD sehingga H_3 ditolak. Jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap ICD sehingga H_4 diterima. Auditor eksternal tidak berpengaruh signifikan terhadap ICD sehingga H_5 ditolak. Kepemilikan manajemen berpengaruh signifikan terhadap ICD sehingga H_6 diterima. Kepemilikan institusi berpengaruh signifikan terhadap ICD sehingga H_7 diterima.

Kata kunci: *corporate governance*, *intellectual capital disclosure*, *annual report*, *content analysis*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya kepada Allah swt atas segala hidayah dan karunia-Nya, sehingga dapat disusun skripsi yang berjudul “**Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap *Intellectual Capital Disclosure* Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**”. terselesainya skripsi ini tidak lain merupakan salah satu kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan, pengarahan, semangat dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Purwanto, M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan, motivasi demi terwujudnya skripsi ini.
2. Bapak Drs. Dul Muid, M.Si., Akt., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan perkuliahan, arahan dan masukan selama penulis menjadi mahasiswa FE Undip.
3. Bapak Dr. H. M. Chabachib, M.Si., Akt., selaku dekan FE Undip periode 2002 - 2010 dan Bapak Prof. Drs. H. M. Natsir, M.Si., Akt, Ph.D., selaku dekan FE Undip 2010 terpilih.
4. Seluruh dosen FE Undip lainnya, khususnya jurusan akuntansi atas segala ilmu yang telah diajarkan. Semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari amal ibadah. Tidak lupa juga kepada seluruh petugas dan karyawan FE Undip.

Ucapan terima kasih juga ditunjukkan kepada orang-orang terdekat dengan penulis yang telah memberikan dukungan selama penulis kuliah di jurusan akuntansi FE Undip, terutama untuk:

1. Ibuku dan bapakku tersayang yang selalu memberikan dukungan yang tulus dan luar biasa serta pengorbanan tanpa mengenal waktu. Semoga Allah SWT menyayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku.
2. Adikku, Budiawan Arief Anggoro. Terima kasih telah memberi semangat. Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah-Nya untuk kita.
3. Teman-teman kontrakan Genuk Krajan II, Mas Bambang, Mas Ari, Japarudin, Luhur, Kunari, Angga, Daniarto, Nandi, Hendi, Dewa.
4. Teman-teman se-jurusan akuntansi FE Undip, Agnar, Firman, Anggara, Wawan, Jati, Yuswan, Muslim, Angga Arief, Sam, Azwar, Eri serta Eka Bagus (Manajemen) yang telah berbagi ilmu dan materi untuk skripsi.
5. Kepada pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan secara langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai masukan yang berharga. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terkait.

Semarang, 30 Desember 2010

Penulis



Bangkit Nugroho

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 <i>Corporate Governance</i>	12
2.1.1.1 Pengertian <i>Corporate Governance</i>	12
2.1.1.2 <i>Corporate Governance</i> di Indonesia.....	13
2.1.1.3 Azas <i>Corporate Governance</i>	15
2.1.2 <i>Intellectual Capital</i>	16
2.1.2.1 Pengertian <i>Intellectual Capital</i>	16
2.1.2.2 Komponen <i>Intellectual Capital</i>	17
2.1.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	21
2.1.4 Teori Agensi.....	21
2.1.5 Asimetri Informasi	22
2.1.6 Teori Stakeholder	24
2.1.7 Teori Legitimasi	25
2.1.8 Laporan Tahunan	26
2.1.9 <i>Unit of Analysis</i>	27
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Pemikiran dan Model Penelitian.....	35
2.4 Perumusan Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	48
3.1.1 Variabel Penelitian	48
3.1.2 Definisi Operasional.....	49
3.1.2.1 <i>Intellectual Capital Disclosure</i>	49
3.1.2.2 Proporsi Komisaris Independen	53
3.1.2.3 Konsentrasi Saham.....	53
3.1.2.4 Ukuran Komite Audit.....	54

3.1.2.5	Jumlah Rapat Komite Audit.....	54
3.1.2.6	Auditor Eksternal	54
3.1.2.7	Kepemilikan Manajemen	55
3.1.2.8	Kepemilikan Institusi	56
3.1.2.9	Usia Listing	56
3.1.2.10	Profitabilitas	56
3.1.2.11	Ukuran Perusahaan.....	57
3.2	Populasi dan Sampel	58
3.3	Jenis dan Sumber Data	60
3.4	Metode Pengumpulan Data	61
3.4.1	<i>Content Analysis</i>	61
3.5	Metode Analisis	62
3.5.1	Analisis Faktor (<i>Factor Analysis</i>)	62
3.5.2	Statistik Deskriptif	63
3.5.3	Uji Reliabilitas	64
3.5.4	Uji Asumsi Klasik	65
3.5.4.1	Uji Normalitas	65
3.5.4.2	Uji Multikolonieritas	66
3.5.4.3	Uji Heteroskedastisitas	66
3.5.5	Model Regresi	67
3.5.6	Analisis Regresi	69
3.5.6.1	Koefisien Determinasi.....	69
3.5.6.2	Uji Pengaruh Simultan (Uji F)	69
3.5.6.3	Uji Pengaruh Parsial (Uji t).....	70
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	72
4.2	Analisis Faktor	74
4.3	Statistik Deskriptif	75
4.4	Uji Reliabilitas	79
4.5	Praktik <i>Intellectual Capital Disclosure</i> (ICD)	80
4.6	Uji Asumsi Klasik	84
4.6.1	Uji Normalitas	84
4.6.2	Uji Multikolonieritas	87
4.6.3	Uji Heteroskedastisitas	90
4.7	Analisis Data	92
4.7.1	Analisis Regresi	95
4.7.1.1	Koefisien Determinasi.....	96
4.7.1.2	Uji Pengaruh Simultan (Uji F)	97
4.7.1.3	Uji Pengaruh Parsial (Uji t).....	97
4.8	Interpretasi Hasil	99
4.8.1	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap <i>Intellectual Capital Disclosure</i>	99
4.8.2	Pengaruh Konsentrasi Saham terhadap <i>Intellectual Capital Disclosure</i>	101
4.8.3	Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap <i>Intellectual Capital Disclosure</i>	102

4.8.4	Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap <i>Intellectual Capital Disclosure</i>	103
4.8.5	Pengaruh Auditor Eksternal terhadap <i>Intellectual Capital Disclosure</i>	104
4.8.6	Pengaruh Kepemilikan Manajemen terhadap <i>Intellectual Capital Disclosure</i>	105
4.8.7	Pengaruh Kepemilikan Institusi terhadap <i>Intellectual Capital Disclosure</i>	106
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	108
5.2	Keterbatasan Penelitian	110
5.3	Saran.....	110
	DAFTAR PUSTAKA	112
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	116

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Definisi <i>Intellectual Capital</i> 20
Tabel 2.2	Ringkasan Penelitian Terdahulu 32
Tabel 3.1	Klasifikasi <i>Intellectual Capital</i> 51
Tabel 3.2	Ringkasan Variabel Penelitian 57
Tabel 4.1	Penentuan Sampel Penelitian dengan <i>Purposive Sampling</i> 72
Tabel 4.2	Sampel Penelitian 73
Tabel 4.3	Hasil Analisis Faktor Menggunakan KMO dan <i>Bartlett's Test</i> .. 74
Tabel 4.4	Statistik Deskriptif 75
Tabel 4.5	Hasil Uji Reliabilitas Data 80
Tabel 4.6	Variasi <i>Intellectual Capital Disclosure</i> 81
Tabel 4.7	Hasil Uji Normalitas Menggunakan <i>Kolmogorov-Smirnov</i> 87
Tabel 4.8	Hasil Uji Multikolinieritas dengan Melihat korelasi Variabel..... 89
Tabel 4.9	Hasil Uji Multikolinieritas dengan Nilai <i>tolerance</i> dan VIF 90
Tabel 4.10	Hasil Analisis Regresi..... 93
Tabel 4.11	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) 94
Tabel 4.12	Hasil Uji ANOVA 94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam <i>Two Tiers System</i> di Indonesia.....	13
Gambar 2.2 Model Penelitian	35
Gambar 4.1 Variasi <i>Intellectual Capital Disclosure</i>	83
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik <i>Normal P-P Plot</i>	85
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas dengan Histogram.....	86
Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	91

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Definisi dan Sifat Informasi <i>Intellectual Capital Disclosure</i>	116
Lampiran B Contoh Praktik <i>Intellectual Capital Disclosure</i>	124
Lampiran C <i>Intellectual Capital Disclosure Index</i>	132
Lampiran D <i>Intellectual Capital Word Count</i>	152
Lampiran E <i>Intellectual Capital Word Count%</i>	153
Lampiran F Hasil Uji Analisis Faktor	155
Lampiran G Variabel Dependen, Independen dan Kontrol.....	156
Lampiran H Hasil Uji Reliabilitas.....	159
Lampiran I Hasil Uji Normalitas	160
Lampiran J Hasil Uji Multikolonieritas	168
Lampiran K Hasil Uji Heteroskedastisitas	170
Lampiran L Hasil Uji Koefisien Determinasi, Uji F dan Uji t	172

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang persaingan bisnis antar perusahaan sudah sangat ketat. Agar dapat bertahan sesuai asumsi *going concern*, perusahaan harus mempunyai strategi yang tepat. Menurut Kuryanto dan Syafruddin (2008), agar perusahaan terus bertahan, perusahaan-perusahaan harus dengan cepat mengubah strateginya dari bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja (*labor-based business*) menuju *knowledge based business* (bisnis berdasarkan pengetahuan), sehingga karakteristik utama perusahaannya menjadi perusahaan berbasis ilmu pengetahuan. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan dapat diperoleh bagaimana cara menggunakan sumber daya lainnya secara efisien dan ekonomis yang nantinya akan memberikan keunggulan kompetitif (Rupert dalam Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Keunggulan kompetitif ini merupakan suatu nilai bagi perusahaan, salah satunya berupa informasi yang ada pada perusahaan tersebut. Dikarenakan bahwa informasi ini menjadi gambaran tentang keadaan perusahaan.

Informasi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). *Stakeholder* tersebut mempunyai kepentingan terhadap perusahaan, yaitu dalam proses pembuatan keputusan (*decision making*) yang berkaitan dengan perusahaan. Lebih lanjut, informasi tersebut menjadi sesuatu yang amat

vital dan perusahaan harus mengungkapkannya secara lengkap (*full disclosure*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Informasi yang disampaikan perusahaan berupa laporan keuangan. Menurut PSAK No.1 revisi 1998, par 1, penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan ini harus dipublikasikan kepada *stakeholder* sebagai alat pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola perusahaan. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan keuangan yang bersifat wajib (*mandatory*) dan bersifat sukarela (*voluntary*). Laporan keuangan *mandatory* terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (PSAK No.1 revisi 1998, par 7).

Selain itu, ada laporan keuangan yang bersifat sukarela (*voluntary*). Laporan keuangan ini tidak diharuskan untuk disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Perusahaan dianjurkan untuk mengungkapkan informasi lain untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun tidak diharuskan oleh PSAK (PSAK No.1 revisi 1998, par 10). Dalam hal tersebut maka perusahaan harus memberikan tambahan pengungkapan informasi yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar (PSAK No.1 revisi 1998, par 12). Perusahaan dianjurkan untuk menyajikan laporan tahunannya yang mengandung informasi yang diperlukan para *stakeholder*, tidak hanya terbatas pada laporan keuangan yang *mandatory* tetapi juga laporan yang bersifat *voluntary*. Salah satu informasi penting yang bersifat *voluntary* adalah informasi tentang *intellectual capital* (IC).

Definisi atas *intellectual capital* bermacam-macam. IC merupakan peningkatan yang diakui mempunyai makna yang jauh lebih besar di dalam menciptakan dan memelihara keunggulan kompetitif dan nilai pemegang saham (Tayles, *et al.*, 2007). Salah satu definisi paling menyeluruh dari *intellectual capital* ditawarkan oleh *The Chartered Institute of Management Accountants* (CIMA) (dalam Li, *et al.*, 2008):

...kepemilikan pengetahuan dan pengalaman, pengetahuan profesional dan *skill*, hubungan-hubungan yang baik, dan kapasitas teknologi, yang mana ketika diterapkan akan memberi keunggulan kompetitif organisasi.

Perkembangan pengungkapan IC (*intellectual capital disclosure*) di Indonesia masih sedikit. Hal ini dikarenakan IC merupakan konsep pengetahuan yang masih baru. Selain itu, juga karena adanya kesulitan dalam pengimplementasian IC di perusahaan. Ini disebabkan karena sulitnya melakukan pengukuran terhadap IC, yang cenderung bersifat kualitatif.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan penelitian terhadap IC, menghasilkan metode pengukuran IC yang semakin variatif, termasuk yang dikelompokkan dalam kategori kuantitatif, seperti model *the value added intellectual coefficient* (VAIC) (Firer dan Williams, 2003). IAI sendiri juga belum mewajibkan perusahaan mengungkapkan IC perusahaan dalam laporan tahunannya. Di dalam PSAK, belum dibuat standar yang mengatur tentang *intellectual capital disclosure*. *Intellectual capital disclosure* ini masih bersifat *voluntary* meskipun pengungkapan informasi tersebut diperlukan guna menyajikan laporan keuangan secara wajar. Akan tetapi, perusahaan dianjurkan

untuk mengungkapkan informasi lain untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun tidak diharuskan oleh PSAK (PSAK No.1 revisi 1998, par 10).

IC ini bukan merupakan aktiva tidak berwujud meskipun memang IC mempunyai karakteristik yang mirip dengan aktiva tidak berwujud (*intangible asset*). Menurut PSAK No.19 revisi 2000, aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Meskipun keduanya sama-sama tidak berwujud tetapi pada dasarnya keduanya memang berbeda. Berdasarkan sejarah, perbedaan antara aset tak berwujud dan IC tidak jelas karena IC dihubungkan sebagai *goodwill* padahal keduanya berbeda (Accounting Principles Board; Accounting Standards Board; Ikatan Akuntan Indonesia; Hong dikutip Kuryanto dan Syafruddin, 2008). Lev (dalam Wang, 2008) menyelidiki rasio nilai buku dalam US *Standard & Poor's* 500 (US S&P 500) berbagai perusahaan dari 1977 sampai 2001 dan menemukan bahwa lebih dari 80% dari nilai pasar perusahaan tidak tercakup di laporan keuangan. Fenomena ini akhirnya menjadi daya tarik banyak peneliti untuk menyelidiki tentang IC itu dan praktik pelaporannya dalam laporan keuangan.

Firer dan Williams (2005) menginvestigasi hubungan struktur kepemilikan perusahaan dan *intellectual capital disclosure*. Adapun variabel yang diteliti adalah konsentrasi kepemilikan, persentase kepemilikan direktur perusahaan, kepemilikan pemerintah dan *intellectual capital disclosure index* (ICDI). Penelitian dilakukan pada 390 perusahaan yang terdaftar di Singapura tahun 2000.

Penelitian ini menghasilkan bahwa konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan direktur perusahaan berpengaruh negatif terhadap ICDI sedangkan kepemilikan pemerintah berhubungan positif terhadap ICDI.

Barako (2007) meneliti hubungan antara atribut *corporate governance* dengan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Variabel yang digunakan adalah komposisi dewan, struktur kepemimpinan ganda, komite audit, konsentrasi pemegang saham, kepemilikan asing, kepemilikan institusi, ukuran perusahaan, *leverage*, auditor eksternal, profitabilitas, likuiditas dan tingkat pengungkapan sukarela. Sampel yang digunakan adalah 43 perusahaan yang terdaftar di *Nairobi Stock Exchange* (Kenya) tahun 1992-2001. Hasilnya menunjukkan bahwa karakteristik tata kelola, struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Penyelidikan tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *intellectual capital disclosure* juga dilakukan oleh Li dan Qi (2008). Variabel yang diuji adalah kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan dan pengungkapan sukarela. Seratus perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Cina tahun 2003-2005 dijadikan sampel penelitian. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kepemilikan manajerial dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Li, *et al.* (2008) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh faktor tata kelola perusahaan terhadap *IC disclosure* dan terdiri dari subkategorinya, menggunakan variasi pengukuran pengungkapan. Li, *et al.* (2008) berhipotesis bahwa ada hubungan yang signifikan antara *IC disclosure* dalam laporan tahunan

dan komposisi dewan, dualitas peran, konsentrasi kepemilikan, ukuran komite audit serta frekuensi rapat komite audit, pengendalian untuk usia listing, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Penelitian ini menggunakan 100 perusahaan terdaftar di UK. Dengan menggunakan *content analysis* dan regresi atas tiga bentuk pengukuran IC *disclosure*, Li, *et al.* (2008) menemukan dukungan untuk semua hipotesis dengan pengecualian atas dualitas peran.

Penelitian mengenai pengaruh struktur *corporate governance* terhadap *intellectual capital disclosure* layak dilakukan di Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, adanya Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan keputusan ketua Bapepam-LK nomor: Kep-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. UU tersebut mengatur tentang struktur dan organ perseroan terbatas maupun praktik tata kelola perusahaan. Di dalam keputusan ketua Bapepam-LK tersebut terdapat kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan tahunan yang di antaranya wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir. Hal ini akan memaksa perusahaan publik agar melakukan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dengan baik. Purnomosidhi (2006, h.8) menyebutkan bahwa:

...perusahaan-perusahaan yang melakukan tata kelola perusahaan akan memberikan lebih banyak informasi, dalam rangka mengurangi asimetri informasi. Informasi yang diberikan akan ditunjukkan dalam tingkat pengungkapan.

Kedua, laporan Taylor dan Associates (dalam Williams, 2000) menunjukkan bahwa pengungkapan informasi *intellectual capital* termasuk dalam

sepuluh peringkat informasi teratas yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi, perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana praktik pengungkapan IC (*intellectual capital disclosure*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketiga, adanya keterbatasan sistem akuntansi tradisional dalam mengungkapkan *voluntary intellectual capital disclosure*. Leadbeater (dikutip Purnomosidhi, 2006) menegaskan bahwa kurangnya informasi yang cukup memadai tentang *intellectual capital* dalam sistem akuntansi tradisional merupakan hambatan utama bagi pengakuan terhadap pentingnya *intellectual capital*. Oleh karena itu, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Intellectual Capital Disclosure Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel proporsi komisaris independen, konsentrasi saham, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, auditor eksternal, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi dan *intellectual capital disclosure* (ICD). Penelitian sebelumnya menggunakan variabel konsentrasi kepemilikan, persentase kepemilikan direktur perusahaan, kepemilikan pemerintah dan *intellectual capital disclosure index* (ICDI) (Fier dan Williams, 2005), komposisi dewan, struktur kepemimpinan ganda, komite audit, konsentrasi pemegang saham, kepemilikan asing, kepemilikan institusi, ukuran perusahaan, *leverage*, auditor eksternal, profitabilitas, likuiditas dan tingkat pengungkapan sukarela (Barako, 2007), komposisi dewan, struktur

kepemilikan, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, dualitas peran dan IC *disclosure* (ICD) (Li, *et al.*, 2008).

2. Dimensi atau klasifikasi item-item pengungkapan (*disclosure*) pada penelitian ini adalah *human capital*, *structural capital* dan *relational capital* sedangkan pada penelitian sebelumnya digunakan dimensi *human resources*, *customer*, *information technology*, *process* dan *property* (Firer dan Williams, 2005), *general and strategic information*, *financial data*, *forward-looking information*, *social and board disclosure* (Barako, 2007), *human capital*, *structural capital* dan *relational capital* (Li, *et al.*, 2008).
3. Penelitian ini menggunakan objek seluruh perusahaan yang terdaftar di Indonesia sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian perusahaan di Singapura (Firer dan Williams, 2005), di Kenya (Barako, 2007) dan di UK (Li, *et al.*, 2008).

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian terdahulu memberikan hasil yang berbeda-beda sehingga perlu dilakukan penelitian ulang untuk melakukan verifikasi terhadap teori tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *intellectual capital disclosure*. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat dibuat suatu perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *intellectual capital disclosure*?

2. Bagaimana pengaruh konsentrasi saham terhadap *intellectual capital disclosure*?
3. Bagaimana pengaruh ukuran komite audit terhadap *intellectual capital disclosure*?
4. Bagaimana pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap *intellectual capital disclosure*?
5. Bagaimana pengaruh auditor eksternal terhadap *intellectual capital disclosure*?
6. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajemen terhadap *intellectual capital disclosure*?
7. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusi terhadap *intellectual capital disclosure*?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditentukan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk menguji apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*.
2. Untuk menguji apakah konsentrasi saham berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*.
3. Untuk menguji apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*.

4. Untuk menguji apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*.
5. Untuk menguji apakah auditor eksternal berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*.
6. Untuk menguji apakah kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*.
7. Untuk menguji apakah kepemilikan institusi berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi khasanah pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi tentang *intellectual capital* sehingga dapat memperkaya ilmu pengetahuan di Indonesia.
2. Bagi Bapepam-LK maupun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), penelitian ini diharapkan dapat mendorong adanya penelitian dan pengembangan tentang standar pelaporan untuk *intellectual capital disclosure* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
3. Bagi *stakeholder*, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang kekayaan perusahaan yang berupa *intellectual capital* dan bagaimana perusahaan mempublikasikan *intellectual capital disclosure*.
4. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan tentang IC.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai landasan teori dan bahasan tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran serta model dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi yang memuat kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Corporate Governance*

2.1.1.1 *Pengertian Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan atau *corporate governance* (CG) adalah suatu kerangka kerja menurut undang-undang, institusi, dan faktor budaya pembentukan pola pengaruh yang digunakan *stakeholders* pada pembuatan keputusan managerial (Weimer dan Pape, 1999). Menurut *Cadbury Committee of United Kingdom* (dikutip FCGI, n.d.), *corporate governance* diartikan sebagai:

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Di samping itu, FCGI (n.d.) juga menjelaskan, bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Berkenaan dengan praktik tata kelola perusahaan (*corporate governance*), terdapat dua sistem tata kelola yang berbeda, yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda (FCGI, n.d.). Sistem tersebut adalah *one tier system* dari Anglo Saxon dan *two tier system* dari Kontinental Eropa. Negara-negara dengan *one tier system* misalnya Amerika Serikat dan Inggris. Negara-negara dengan *two tiers system* adalah Denmark, Jerman, Belanda, dan Jepang. Karena sistem hukum Indonesia berasal dari sistem hukum Belanda maka hukum perusahaan Indonesia

menganut *two tiers system* untuk struktur dewan dalam perusahaan (FCGI, n.d).

2.1.1.2 *Corporate Governance* di Indonesia

Pada *two tier system* ini, terdapat dua organ perusahaan yaitu dewan direksi dan dewan komisaris. Menurut Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Hubungan antara dewan direksi dan dewan komisaris dalam *two tiers System* di Indonesia dapat dijelaskan pada gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1
Struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam *Two Tiers System* yang diadopsi oleh Indonesia



Sumber: FCGI (n.d.).

Di Indonesia, perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dan terdaftar di BEI diwajibkan untuk mematuhi Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan keputusan ketua Bapepam-LK nomor: Kep-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. UU tersebut mengatur tentang struktur dan organ perseroan terbatas maupun praktik tata kelola perusahaan. Di dalam keputusan ketua Bapepam-LK tersebut terdapat kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan tahunan yang di antaranya wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir. Laporan tahunan adalah laporan keuangan yang wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit. Berdasarkan kedua peraturan itu maka setiap emiten diharuskan untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melaporkannya dalam laporan tahunan.

Menurut Li, *et al.* (2008), justifikasi untuk pertimbangan tata kelola perusahaan adalah bahwa dewan direksi mengelola pengungkapan informasi di dalam laporan tahunan dan oleh karena itu, unsur tersebut menjadi penting. Li, *et al.* (2008) juga menyatakan bahwa IC *disclosure* yang tinggi diharapkan menyediakan suatu paket pemantauan yang lebih intensif bagi sebuah perusahaan untuk mengurangi perilaku oportunistik manajemen dan asimetri informasi.

Pengadopsian alat pengendalian intern, seperti komite audit, komisaris dan pemisahan peran dari *chairman* dan *chief executive*, mungkin mempertinggi kualitas pengawasan dalam keputusan kritis tentang investasi *intellectual capital* dan kinerja (Keenan dan Aggestam, 2001).

2.1.1.3 Asas *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), ada lima asas *Good Corporate Governance* yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance* (GCG) perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.2 *Intellectual Capital* (IC)

2.1.2.1 Pengertian *Intellectual Capital* (IC)

Menurut Saleh, *et al.* (2008), sampai saat ini tidak ada definisi IC yang berterima umum atau universal. Salah satu definisi paling menyeluruh dari IC ditawarkan oleh *The Chartered Institute of Management Accountants* (CIMA) (dalam Li, *et al.*, 2008):

...kepemilikan pengetahuan dan pengalaman, pengetahuan profesional dan *skill*, hubungan-hubungan yang baik, dan kapasitas teknologi, yang mana ketika diterapkan akan memberi keunggulan kompetitif organisasi.

Menurut Li, *et al.* (2006), definisi ini meliputi dua fitur utama IC. Yang pertama meliputi sumber daya *intellectual* dari sebuah organisasi seperti pengetahuan, pengalaman, kecakapan, kapasitas teknologi, yang sejalan dengan definisi yang

lain (seperti Hudson, Ulrich, Nahapiet dan Ghoshal, Mouritsen, Sullivan dan Stewart). Adapun yang kedua, definisi CIMA (dalam Li, *et al.*, 2006) menekankan dampak IC dalam menciptakan atau mendukung keunggulan kompetitif, suatu penegasan juga ditemukan dalam penelitian Edvinsson dan Sullivan, Edvinsson dan Malone dan Lynn.

Williams (2000) mengemukakan pengertian IC sebagai:

The enhanced value of a firm attributable to assets, generally of an intangible nature, resulting from the company's organizational function, processes and information technology networks, the competency and efficiency of its employees and its relationship with its customers. Intellectual capital assets are developed from (a) the creation of new knowledge and innovation; (b) application of present knowledge to present issues and concerns that enhance employees and customers; (c) packaging, processing and transmission of knowledge; and (d) the acquisition of present knowledge created through research and learning.

Adapun Marr dan Schiuma (dalam CIMA, n.d.) mendefinisikan bahwa:

Intellectual capital is the group of knowledge assets that are attributed to an organization and most significantly contribute to an improved competitive position of this organisation by adding value to defined key stakeholders.

2.1.2.2 Komponen *Intellectual Capital* (IC)

Ada banyak pendapat mengenai komponen-komponen IC. Menurut Li, *et al.*, 2006), tidak ada teori atau skema klasifikasi yang berterima umum untuk IC. Brooking (dalam Williams, 2000) mengusulkan bahwa IC adalah suatu fungsi dari empat tipe besar dari aset, yaitu:

1. *market assets*
2. *intellectual property assets*
3. *human-centered assets*
4. *infrastructure assets*

Williams (2000) mengategorikan konsep IC ke dalam empat komponen. Ini konsisten dengan literatur baru-baru ini tentang IC seperti Brookings (dalam Williams, 2000). Komponen tersebut adalah:

1. *human resources*

Meliputi laporan tentang kualifikasi karyawan, penanganan sistem manajemen tentang tugas pengembangan SDM dan kepuasan karyawan.

2. *Customers*

Meliputi laporan tentang komposisi pelanggan, usaha perusahaan untuk mengembangkan hubungan pelanggan dan kepuasan pelanggan serta loyalitas (pengulangan bisnis dan hubungan jangka panjang).

3. *Information technology and process*

Meliputi lingkup dan ketersediaan sistem *information technology* dan suatu ekspresi yang berorientasi aktivitas dari jumlah aktivitas bisnis terutama yang diutamakan oleh perusahaan, contohnya, investasi dalam R&D, masa tenggang, produktivitas dan ekonomi dari proses administratif. Proses adalah juga suatu ekspresi dari kualitas, tingkat kesalahan, dan waktu tunggu terhadap sekeliling perusahaan.

4. *Intellectual property*

Meliputi laporan dari suatu perusahaan tentang investasinya ke dalam dan pengembangan dari ide kreatif dan materi yang mana telah ditugaskan. Mencakup istilah seperti item-item digunakan mengacu kelompok hak-hak yang meliputi hak paten, *trade-marks*, hak cipta, rancangan industri, rahasia perdagangan dan informasi rahasia.

Sveiby; Meritum (dalam Li, *et al.*, 2008) menyarankan bahwa *Intellectual Capital* dapat dikelompokkan ke dalam tiga subkategori, yaitu:

1. *Human capital*

Sebagai contoh, pendidikan staf, pelatihan, pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan

2. *Structural capital*

Mencakup struktur-struktur internal seperti penelitian dan pengembangan (R&D), hak paten, proses-proses manajemen.

3. *Relational capital*

Mencakup hubungan-hubungan eksternal seperti hubungan pelanggan, merek dan reputasi.

Saleh, *et al.* (2008) mengelompokkan IC ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. *Human capital*

Diartikan sebagai pengetahuan yang dibawa bersama karyawan ketika mereka meninggalkan organisasi.

2. *Internal structure (organizational capital)*

Merupakan pengetahuan di dalam organisasi yang bebas dari orang atau dapat didefinisikan secara sederhana sebagai pengetahuan yang tinggal di dalam organisasi kapan saja karyawan meninggalkan pada akhir hari kerja.

3. *External structure (relational capital)*

Didefinisikan sebagai pengetahuan berharga yang berinteraksi dengan sumber eksternal organisasi seperti pelanggan, pemasok, kreditor, jaringan, *strategic alliances*, saluran distribusi (Sveiby; Bozzolan, *et al.*

dikutip Saleh, et al., 2008).

Beberapa definisi dan komponen tentang *intellectual capital* telah dikemukakan oleh berbagai peneliti. Penjelasan ini dirangkum pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Ringkasan Gagasan dan Definisi dari IC Menurut Berbagai Peneliti

No.	Peneliti	Susunan	Definisi
1.	Bontis (1996)	a. <i>human capital</i> b. <i>structural capital</i> c. <i>relational capital</i>	IC may provide a new resource-base for an organization to complete and win.
2.	Roos dan Roos (1997)	a. <i>human capital</i> b. <i>structural capital</i>	IC is the sum of the "hidden" assets of the company, such as brands, trademark and patents and also includes all assets that are not shown in the financial statements. IC is a company's the most important source of sustainable competitive advantages.
3.	Stewart (1997)	a. <i>human capital</i> b. <i>structural capital</i> c. <i>customer capital</i>	IC is knowledge, information, intellectual property and experience; it is a collective brainpower or useful knowledge.
4.	Edvinsson dan Malone (1997)	a. <i>human capital</i> b. <i>structural capital</i> c. <i>customer capital</i>	IC refers to the difference between a company's market value and book value.
5.	Sveiby (1998)	a. <i>personnel competence</i> b. <i>internal structure</i> c. <i>external structure</i>	IC is knowledge that can be converted into value.
6.	Bontis (1999)	a. <i>human capital</i> b. <i>structural capital</i> c. <i>relational capital</i>	IC is the effective use of knowledge as opposed to information.
7.	Andriessen dan Stem (2004)	a. <i>human resource</i> b. <i>organizational resource</i> c. <i>relational capital</i>	IC is all intangible resources that are available to an organization, that give a relative advantage, and which in combination are able to produce future benefits.
8.	Youndt, et al. (2004)	a. <i>human capital</i> b. <i>organizational capital</i> c. <i>social capital</i>	IC is the sum of all knowledge that an organization is able to leverage in the process of conducting business to gain competitive advantage.

Sumber: Wang (2008).

2.1.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 19 (revisi 2000)

PSAK Nomor 19 revisi 2000 membahas tentang aktiva tidak berwujud (*intangible assets*). Aktiva tidak berwujud merupakan aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Contoh aktiva tak berwujud yang dicakup dalam lingkup yang luas antara lain: hak paten, hak cipta, kesetiaan pelanggan, hak pemasaran dan lain-lain. *Intellectual capital* sendiri, seperti yang sudah sering disebutkan sebelumnya, merupakan kategori aktiva tidak berwujud sehingga berkaitan erat dengan penelitian ini.

Aktiva tidak berwujud diakui jika, dan hanya jika:

1. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aktiva tersebut; dan
2. Biaya perolehan aktiva tersebut dapat diukur secara andal.

2.1.4 Teori Agensi

Hubungan agensi ada ketika ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melaksanakan itu, prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen tersebut untuk membuat keputusan (*decision making*) (Anthony dan Govindarajan, 2005). Teori agensi menyediakan suatu kerangka untuk menghubungkan perilaku pengungkapan sukarela terhadap tata kelola perusahaan, oleh karenanya mekanisme-mekanisme

pengendalian dirancang untuk mengurangi masalah agensi yang timbul dari pemisahan antara kepemilikan dan manajemen (Welker dalam Li, *et al.*, 2008). Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam praktik teori agensi adalah agen dan prinsipal. Menurut Hendriksen dan Van Breda (2000), agen menutup kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal sedangkan prinsipal menutup kontrak untuk memberi imbalan kepada agen.

Menurut Li, *et al.* (2008), pendapat tentang teori agensi ini dapat diperluas pada pengungkapan *intellectual capital*, oleh karenanya manajemen dapat menentukan tingkat pengungkapan dan dengan demikian mengurangi ketidakpastian investor berkenaan dengan adanya pengaruh dari IC terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, *IC disclosure* yang tinggi diharapkan untuk menyediakan suatu paket pemantauan yang lebih intensif bagi sebuah perusahaan untuk mengurangi perilaku oportunistik manajemen dan asimetri informasi.

2.1.5 Asimetri Informasi (*Information Asymmetries*)

Leadbeater (dikutip Purnomosidhi, 2006) menegaskan bahwa kurangnya informasi yang cukup memadai tentang *intellectual capital* dalam sistem akuntansi tradisional merupakan hambatan utama bagi pengakuan terhadap pentingnya *intellectual capital*. Menurut Li, *et al.* (2006), sistem akuntansi tradisional hanya mengukur nilai aset keuangan dan fisik, memberikan informasi kecil pada sumber daya tidak berwujud (*intangible resource*). Ada suatu kekurangan mekanisme akuntansi yang memadai terhadap pengukuran dan pelaporan aset tidak berwujud kepada investor eksternal dan pembuat keputusan

(Amir dan Lev; Lev dan Sougiannis; Lev dan Zarowin dikutip Li, *et al.*, 2006), membawa kepada kegagalan yang tumbuh dan tersebar luas dengan pelaporan tradisional (Starovic dan Marr dalam Li, *et al.*, 2006).

Kurangnya mekanisme pengungkapan informasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana pihak prinsipal tidak dapat memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen dan prinsipal tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan (Anthony dan Govindarajan, 2005). Menurut Li, *et al.* (2006), penyelidikan terhadap pemegang saham pengguna laporan keuangan perusahaan mengungkapkan bahwa kegunaan dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar untuk publik telah menurun (Epstein dan Pava; Powell dan Schipper; Francis dan Schipper; Lev), menciptakan suatu kesenjangan informasi antara penerbit dan pengguna informasi (Epstein dan Pava; Powell dan Schipper; Lev). Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan berbasis biaya historis harus bersandar pada sumber informasi lain (Guthrie dalam Li, *et al.*, 2006). Sumber lain yang dimaksud adalah pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Purnomosidhi (2006, h.8) menyebutkan bahwa:

...perusahaan-perusahaan yang melakukan tata kelola perusahaan akan memberikan lebih banyak informasi, dalam rangka mengurangi asimetri informasi. Informasi yang diberikan akan ditunjukkan dalam tingkat pengungkapan.

Hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para *stakeholder* akan informasi yang lebih lengkap, yaitu tentang *intellectual capital disclosure*.

2.1.6 Teori *Stakeholder*

Berdasarkan teori *stakeholder*, manajemen perusahaan diharapkan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan yang diharapkan *stakeholder* dan melaporkannya kepada *stakeholder* (Guthrie, *et al.*, 2004). Teori ini menyarankan bahwa semua *stakeholder* mempunyai hak untuk disediakan dengan informasi tentang bagaimana dampak aktivitas organisasi terhadapnya (sebagai contoh, polusi, sponsor komunitas, anjuran pengamanan, dll), sama jika mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi dan sama jika mereka tidak dapat memainkan secara langsung suatu peran konstruktif dalam hidup organisasi (Deegan dikutip Guthrie, *et al.*, 2004). Teori *stakeholder* menganggap akuntabilitas organisasi disebabkan oleh organisasi, yang memperluas di luar kinerja ekonomi atau keuangan mereka. Ini menyarankan bahwa mereka akan memilih untuk mengungkapkan informasi secara sukarela tentang kinerja intelektual, sosial dan lingkungan mereka, melebihi dan di atas persyaratan wajib.

Menurut Ghazali dan Chariri (2007), *stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu, ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan *stakeholder* (Ullman dikutip Ghazali dan Chariri, 2007). Salah satu cara memuaskan keinginan *stakeholder* dapat berupa pengungkapan informasi-informasi sukarela (*voluntary disclosure*) yang dibutuhkan oleh *stakeholder*.

2.1.7 Teori Legitimasi

Menurut Guthrie, *et al.* (2004), teori legitimasi erat dihubungkan dengan teori stakeholder. Teori ini mengusulkan bahwa organisasi mencari secara terus-menerus untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batas dan norma dari masing-masing masyarakat mereka. Karena pengaruh masyarakat luas dapat menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya maka perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007). Mengadopsi sebuah perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan melaporkan secara sukarela pada aktivitas apakah melaporkan tentang aktivitas jika manajemen merasa bahwa aktivitas-aktivitas tertentu diharapkan oleh komunitas-komunitas di mana perusahaan beroperasi (Guthrie, *et al.*, 2004). Teori legitimasi bersandar pada dugaan bahwa ada suatu “kontrak sosial” antara perusahaan dan masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Kontrak sosial digunakan untuk mewakili sejumlah besar harapan-harapan masyarakat yang berakibat pada bagaimana organisasi perlu melakukan operasinya. Harapan-harapan masyarakat ini tidak ditetapkan. Harapan itu berubah dari waktu ke waktu. Ini mensyaratkan perusahaan untuk ikut serta terhadap lingkungan di mana perusahaan beroperasi (Deegan dalam Guthrie, *et al.*, 2004).

Teori legitimasi dikaitkan erat dengan pelaporan IC dan penggunaan metode *content analysis* sebagai suatu pengukur dari pelaporan tersebut (Guthrie, *et al.*, 2004). Perusahaan lebih mungkin untuk melaporkan tentang IC-nya jika

mereka memiliki kebutuhan secara rinci untuk melakukan ini, jika mereka tidak dapat melegitimasi status mereka via aktiva keras yang diakui sebagai sebuah simbolis atas sukses perusahaan tradisional.

2.1.8 Laporan Tahunan (*Annual Report*)

Menurut keputusan ketua Bapepam-LK nomor: Kep-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik, laporan tahunan adalah laporan keuangan yang wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit. Menurut Niemark (dikutip Li, *et al.*, 2006), laporan tahunan perusahaan berisi akumulasi informasi perusahaan tentang pengembangan dan kegiatan yang terjadi selama tahun pelaporan dalam suatu cara yang komprehensif dan lengkap, dimana dibuat pada basis regular dan menawarkan sebuah kesempatan untuk analisis perbandingan perilaku dan kebijakan manajemen lintas periode pelaporan. Akan tetapi, *annual report* hanya salah satu dari sarana komunikasi publik yang dapat digunakan perusahaan untuk mengeksternalisasikan informasi kepada komunitas investor untuk menarik modal (Frederiksen and Westphalen, dalam Li, *et al.*, 2006).

Guthrie, *et al.* (2004) menyatakan bahwa idealnya semua komunikasi dari suatu organisasi harus diawasi jika akan mengumpulkan semua pelaporan IC eksternal perusahaan. Akan tetapi, masalah dengan standar ini adalah bahwa itu

adalah hal yang mustahil untuk memastikan bahwa semua komunikasi telah diidentifikasi (Gray, *et al.* dalam Guthrie, *et al.*, 2004). Meskipun demikian, laporan tahunan merupakan suatu sumber data yang sangat bermanfaat karena manajer perusahaan biasanya mengisyaratkan apa yang penting melalui mekanisme pelaporan (Guthrie dan Petty, 2000). Laporan tahunan dipilih karena dua alasan (Lang dan Lundholm dikutip Bozzolan, *et al.*, 2003). Pertama, karena mempertimbangkan suatu sumber informasi perusahaan yang penting menurut pemakai eksternal seperti *stakeholder*. Kedua, tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan dihubungkan secara positif dengan jumlah informasi perusahaan yang dikomunikasikan kepada pasar dan *stakeholder* dengan menggunakan media lain.

2.1.9 Unit of analysis

Menurut Guthrie, *et al.* (2004), *content analysis* membutuhkan seleksi dari suatu *unit of analysis*. Salah satu tahap dalam metode *content analysis* adalah menentukan atau mendefinisikan unit pencatatan (*recording unit*) (Krippendorff; Weber dalam Bozzolan, *et al.*, 2003). Suatu unit pencatatan adalah segmen isi yang khusus yang dikenali dari penempatannya ke dalam suatu kategori yang diberikan (Holsti dalam Guthrie, *et al.*, 2004).

Menurut Li, *et al.*, 2006), alasan utama dari *content analysis* adalah bahwa frekuensi dimana suatu unit analisis (yaitu, suatu istilah, kalimat, atau paragraf) yang tampak dalam suatu teks mengindikasikan arti pentingnya satuan (*unit*). Akan tetapi, dalam literatur akuntansi telah timbul suatu perdebatan (Gray, *et al.*

dalam Guthrie, *et al.*, 2004) mengenai penggunaan kata, kalimat, bagian halaman sebagai dasar pengkodean (Guthrie, *et al.*, 2004). Pada penelitian Hackstone dan Milne, dalam Cerbioni dan Parbonetti (2007), unit analisis yang digunakan adalah kalimat sedangkan Li, *et al.* (2008) menggunakan unit analisis yaitu frase dan *word count*. Menurut Hackstone dan Milne (dalam Cerbioni dan Parbonetti, 2007), kalimat dipilih sebagai sebuah unit pencatatan karena ini dianggap sebagai suatu unit analisis yang lebih reliabel daripada jumlah halaman atau jumlah paragraf. Penggunaan kalimat untuk pengkodean dan pengukuran mungkin untuk menyediakan data yang lengkap, reliabel dan bermakna untuk analisis lebih lanjut (Milne dan Adler dalam Guthrie, *et al.*, 2004). Menurut Li, *et al.* (2008), pengkodean menggunakan dengan frase dan *word count* adalah untuk menghindari masalah kalimat pengkodean dalam hal keputusan yang melebihi tema dominan dan frase meninggalkan arti pada hak milik mereka walaupun memungkinkan pengukuran jumlah informasi yang disediakan. Pada penelitian ini, frase dan *word count* digunakan sebagai unit analisis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Li, *et al.* (2008).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang *corporate governance* maupun *intellectual capital* telah dilakukan oleh banyak peneliti di luar negeri. Hasil-hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian ini.

Penelitian telah dilakukan Firer dan Williams (2005) dengan menggunakan sampel 390 perusahaan yang terdaftar di di Singapura tahun 2000.

Studi ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara tiga karakteristik struktur kepemilikan dan praktik pengungkapan IC sukarela. Variabel yang diteliti adalah konsentrasi kepemilikan, persentase kepemilikan direktur perusahaan, kepemilikan pemerintah dan *intellectual capital disclosure index* (ICDI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan direktur perusahaan berpengaruh negatif terhadap ICDI sedangkan kepemilikan pemerintah berhubungan positif terhadap ICDI.

Barako, *et al.* (2006) meneliti hubungan antara atribut *corporate governance* dengan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Sampel yang digunakan adalah 43 perusahaan yang terdaftar di *Nairobi Stock Exchange* (Kenya) tahun 1992-2001. Variabel yang digunakan adalah proporsi dewan komisaris, struktur kepemimpinan ganda, keberadaan komite audit dan tingkat pengungkapan sukarela. Hasilnya menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela sedangkan struktur kepemimpinan ganda tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Penyelidikan tentang pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan IC juga dilakukan oleh Cerbioni dan Parbonetti (2007). Variabel yang diuji adalah ukuran dewan, komposisi dewan, dualitas CEO, komite dewan dan pengungkapan sukarela IC. Lima puluh empat perusahaan bioteknologi yang terdaftar di negara-negara Eropa tahun 2002-2004 dijadikan sampel penelitian. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa komposisi dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela IC sedangkan ukuran dewan, dualitas CEO dan

komite dewan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela IC.

White, *et al.* (2007) menyelidiki *key drivers* dan tingkat pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan pada perusahaan bioteknologi. Sampel yang digunakan adalah 96 perusahaan yang terdaftar di Australia tahun 2005. Variabel penelitiannya yaitu ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, independensi dewan, umur perusahaan, *leverage* dan pengungkapan sukarela IC. Hasil penelitian menunjukkan variabel independensi dewan, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan IC sukarela sedangkan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap praktik pengungkapan IC.

Li dan Qi (2008) menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan di Cina. Variabel yang diuji yaitu kepemilikan manajemen, konsentrasi kepemilikan dan pengungkapan sukarela. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di *Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges* (Cina) tahun 2003-2005. Sampel yang diteliti adalah 100 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Darus, *et al.* (2008) menginvestigasi tentang *proprietary costs*, struktur kepemilikan dan kredibilitas *voluntary disclosure*. Variabel yang diteliti adalah *investment opportunity set* (IOS), kepemilikan keluarga, kepemilikan direktur, kepemilikan *blockholder* asing, luas pengungkapan sukarela dan *return* saham sekarang dan laba masa depan. Sampel yang digunakan yaitu 155 perusahaan

yang terdaftar di bursa Malaysia pada tahun 2002. Hasil penelitian yang diperoleh adalah *investment opportunity set* (IOS) dan kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan sukarela. Kepemilikan *blockholder* asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Kepemilikan direktur tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan. Luas pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap *return* saham sekarang dan laba masa depan.

Penelitian tentang IC dan *corporate governance* juga dilakukan oleh Li, *et al.* (2008). Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara IC *disclosure* dan variabel *corporate governance*. Peneliti menggunakan sampel 100 perusahaan yang terdaftar di Inggris. Variabel yang diuji adalah komposisi dewan, struktur kepemilikan, ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dualitas peran dan IC *disclosure*. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa komposisi dewan, ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap IC *disclosure* sedangkan struktur kepemilikan berpengaruh negatif. Dualitas peran tidak berpengaruh terhadap IC *disclosure*. Banyak penelitian tentang *intellectual capital disclosure* yang telah dilakukan. Adapun ringkasan penelitian tersebut ditunjukkan dalam tabel 2.2 di halaman berikut ini.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (tahun penelitian)	Variabel Penelitian	Sampel dan Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Firer dan Williams (2005)	Konsentrasi kepemilikan, persentase kepemilikan direktur perusahaan, kepemilikan pemerintah dan <i>intellectual capital disclosure index</i> (ICDI).	390 perusahaan yang terdaftar di Singapura tahun 2000.	Konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan direktur perusahaan berpengaruh negatif terhadap ICDI sedangkan kepemilikan pemerintah berhubungan positif terhadap ICDI.
2.	Barako, <i>et al.</i> (2006).	Proporsi dewan komisaris, struktur kepemimpinan ganda, keberadaan komite audit dan tingkat pengungkapan sukarela.	43 perusahaan yang terdaftar di <i>Nairobi Stock Exchange</i> (Kenya) tahun 1992-2001.	Proporsi dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela sedangkan struktur kepemimpinan ganda tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela.
3.	Barako (2007)	Komposisi dewan, struktur kepemimpinan ganda, komite audit, konsentrasi pemegang saham, kepemilikan asing, kepemilikan institusi, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , auditor eksternal, profitabilitas, likuiditas dan tingkat pengungkapan sukarela.	43 perusahaan yang terdaftar di <i>Nairobi Stock Exchange</i> (Kenya) tahun 1992-2001.	Karakteristik tata kelola, struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

4.	Cerbioni dan Parbonetti (2007)	Ukuran dewan, komposisi dewan, dualitas CEO, komite dewan dan pengungkapan sukarela IC.	54 perusahaan bioteknologi yang terdaftar di negara-negara Eropa tahun 2002-2004.	Komposisi dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela IC sedangkan ukuran dewan, dualitas CEO dan komite dewan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela IC.
5.	Sudarmadji dan Sularto (2007)	Ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> , tipe kepemilikan dan <i>voluntary disclosure</i> .	8 perusahaan manufaktur yang ada di BEJ tahun 2004.	Ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> dan tipe kepemilikan perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>voluntary disclosure</i> .
6.	White, <i>et al.</i> (2007)	Ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, independensi dewan, umur perusahaan, <i>leverage</i> dan pengungkapan sukarela IC.	96 perusahaan bioteknologi yang terdaftar di Australia tahun 2005.	Independensi dewan, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan IC sukarela sedangkan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan IC.
7.	Li dan Qi (2008)	Kepemilikan manajemen, konsentrasi kepemilikan dan pengungkapan sukarela.	100 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Cina tahun 2003-2005.	Kepemilikan manajemen dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.
8.	Li, <i>et al.</i> (2008)	Komposisi dewan, struktur kepemilikan, ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dualitas peran dan IC <i>disclosure</i> .	100 perusahaan yang terdaftar di <i>London Stock Exchange</i> (Inggris).	Komposisi dewan, ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap IC <i>disclosure</i> sedangkan struktur kepemilikan berpengaruh negatif. Dualitas peran tidak berpengaruh terhadap IC <i>disclosure</i> .

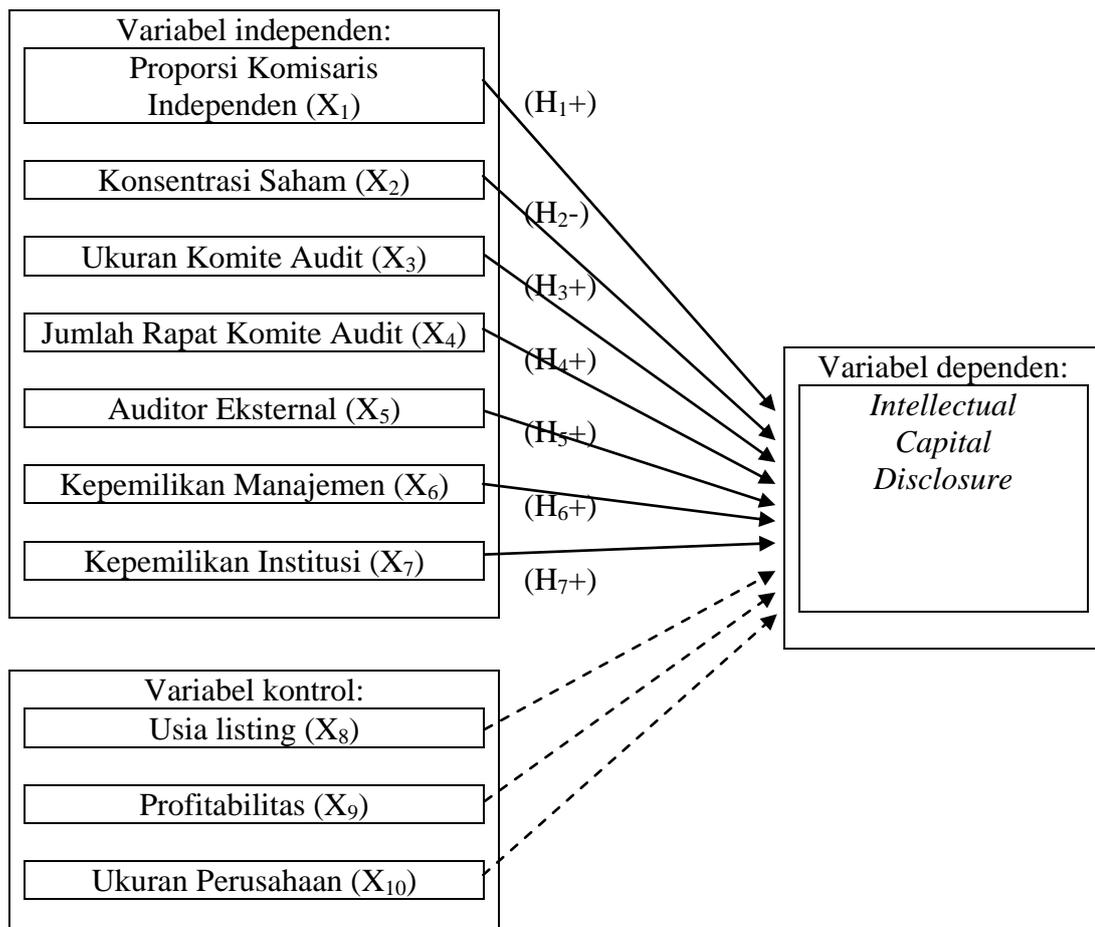
9.	Darus, <i>et al.</i> (2008)	<i>Investment opportunity set</i> (IOS), kepemilikan keluarga, kepemilikan direktur, kepemilikan <i>blockholder</i> asing, luas pengungkapan sukarela dan <i>return</i> saham sekarang dan laba masa depan.	155 perusahaan yang terdaftar di bursa Malaysia tahun 2002.	IOS dan kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan sukarela sedangkan kepemilikan <i>blockholder</i> asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Kepemilikan direktur tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan. Luas pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap <i>return</i> saham sekarang dan laba masa depan.
10.	Shan (2008)	Konsentrasi kepemilikan, konsentrasi kepemilikan asing, konsentrasi kepemilikan negara, proporsi komisaris independen, proporsi pengawas profesional, ukuran perusahaan, perhatian media cetak, kesempatan pertumbuhan investasi dan <i>related-party disclosure</i> .	118 perusahaan yang terdaftar di <i>Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges</i> (Cina) tahun 2001-2005.	Konsentrasi kepemilikan asing, konsentrasi kepemilikan negara, proporsi direktur independen, proporsi pengawas profesional, ukuran perusahaan dan perhatian media cetak berpengaruh positif terhadap <i>related-party disclosure</i> . Konsentrasi kepemilikan dan kesempatan pertumbuhan investasi berpengaruh negatif terhadap <i>related-party disclosure</i> .

Sumber: Data sekunder diolah (2010).

2.3 Kerangka Pemikiran dan Model Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh struktur *corporate governance* terhadap *intellectual capital disclosure*. Variabel penelitian yang digunakan meliputi variabel independen, yaitu proporsi komisaris independen, konsentrasi saham, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, auditor eksternal, kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusi. Adapun variabel independennya adalah *intellectual capital disclosure*. Hubungan pengaruh tersebut dapat dijelaskan dalam gambar 2.2 di bawah ini.

Gambar 2.2
Model Penelitian



Sumber: Firer dan Williams (2005); Barako (2007); Li, *et al.* (2008); Li dan Qi (2008), diolah.

2.4 Perumusan Hipotesis

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen (INED) Terhadap *Intellectual Capital Disclosure*

Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota komisaris. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006), komisaris independen adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Kriteria tentang komisaris independen menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 adalah sebagai berikut:

1. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha emiten atau perusahaan publik.

Berdasarkan *resource dependence theory*, Haniffa dan Cooke (dalam Li, *et al.*, 2008) mengusulkan lebih banyak dewan komisaris di dewan selama mereka dapat menyediakan keahlian, prestasi, hubungan yang lebih luas dan memainkan suatu peran kunci dalam mempengaruhi pengungkapan. Memperluas uraian ini, Gibbins, *et al.* (dikutip Li, *et al.*, 2008) menyatakan bahwa keahlian dan pengalaman yang lebih luas dari para dewan komisaris akan mendorong manajemen untuk mengambil suatu posisi pengungkapan melewati suatu ketaatan pada aturan keagamaan, ketaatan tanpa kritik pada norma yang ditentukan, pada suatu posisi yang lebih proaktif yang mencerminkan keterkaitan nilai *intellectual capital* kepada *stakeholders*.

Li, *et al.* (2008) menyatakan penemuan dari studi pengungkapan sukarela sebelumnya yang mana mempertimbangkan komposisi dewan sebagai kemungkinan faktor penentu dari pengungkapan sukarela adalah bermacam-macam; beberapa menemukan bahwa proporsi dari dewan komisaris berhubungan secara positif dengan kemampuan dewan untuk mempengaruhi keputusan pengungkapan sukarela (seperti, Beasley; Chen dan Jaggi), yang lainnya menemukan tanpa ada hubungan (Ho dan Wong; Brammer dan Pavelin). Eng dan Mak (dalam Li, *et al.*, 2008); Haniffa dan Cooke (dikutip Li, *et al.*, 2008) mengamati bahwa proporsi dari dewan komisaris berhubungan negatif dengan pengungkapan sukarela. Menurut Li, *et al.*, (2008), satu alasan yang mungkin adalah bahwa dewan komisaris tidak perlu independen. Komisaris independen adalah individu yang secara khas dengan reputasi keahlian dan profesional yang relevan untuk bertahan, tanpa adanya peran manajemen atau hubungan dengan

perusahaan (Combined Code dalam Li, *et al.*, 2008). Tetapi, Cotter dan Silvester (dikutip Li, *et al.*, 2008) menyatakan bahwa dewan komisaris berada di suatu posisi yang tidak lebih baik untuk mengawasi manajemen. Patelli dan Prencipe (dalam Li, *et al.*, 2008) menemukan suatu hubungan positif dengan jumlah informasi sukarela yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.

Pengaruh Konsentrasi Saham (SCON) Terhadap *Intellectual Capital Disclosure*

Kepemilikan perusahaan dulu dipandang tersebar di antara banyak pemegang saham sesuai model Berle dan Means (dikutip Feliana, 2007). La Porta, *et al.* (dalam Feliana, 2007) menemukan bahwa struktur kepemilikan yang terkonsentrasi terjadi di negara-negara tingkat *corporate governance* yang rendah. Rendahnya tingkat *corporate governance* juga terjadi di Indonesia (Feliana, 2007). Secara spesifik untuk Indonesia, La Porta, *et al.* (dikutip Feliana, 2007) menemukan bahwa *French origin countries group* (termasuk Indonesia) memiliki konsentrasi kepemilikan tertinggi dibandingkan dengan tiga *origin countries group* yang lain.

Beberapa studi menunjukkan bahwa terdapat dua potensial masalah agensi (*agency problem*) yang berkaitan dengan kepemilikan, yaitu *agency problem* antara manajemen dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Teoritikus

agensi membuktikan bahwa perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan yang lebih besar mengungkapkan lebih banyak informasi untuk mengurangi biaya agensi dan asimetri informasi (Fama dan Jensen dikutip Firer dan Williams, 2005). Selain itu, menurut Raffournier (dikutip Li, *et al.*, 2008), teori agensi membuktikan bahwa dengan penyebaran kepemilikan yang lebih besar, perusahaan mungkin lebih banyak mengalami tekanan dari pemegang saham tentang pengungkapan yang lebih besar untuk mengurangi biaya agensi dan asimetri informasi. Sebaliknya, perusahaan dengan kepemilikan yang dimiliki secara terbatas diharapkan lebih sedikit memiliki asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham mayoritas yang pada umumnya memiliki akses terhadap informasi yang mereka butuhkan dan dapat menyediakan suatu sistem tata kelola aktif yang sulit bagi investor yang lebih kecil, lebih pasif dan kurang diberi informasi (Cormier, *et al.*, dalam Li, *et al.*, 2008).

Hasil empiris hubungan antara konsentrasi kepemilikan dan pengungkapan perusahaan bermacam-macam. Menurut Barako (2007), McKinnon dan Dalimunthe mengamati suatu hubungan yang lemah antara struktur kepemilikan dan pengungkapan sukarela dari informasi segmen, sedangkan Craswell dan Taylor menemukan tidak ada hubungan antara struktur kepemilikan dan pengungkapan sukarela. Hossain, *et al.* menemukan suatu hubungan negatif, sedangkan Haniffa dan Cooke mencatat suatu hubungan positif ketika meneliti perusahaan yang terdaftar di Malaysia (dikutip Barako, 2007). Struktur kepemilikan akan mempengaruhi tingkat pemantauan dan juga tingkat pengungkapan sukarela (Eng dan Mak dalam Li, *et al.*, 2008). Berdasarkan uraian

di atas, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Konsentrasi saham berpengaruh negatif terhadap *intellectual capital disclosure*.

Pengaruh Ukuran Komite Audit (SAC) Terhadap *Intellectual Capital Disclosure*

Pengawasan dewan (*board monitoring*) adalah suatu fungsi yang bukan hanya dari struktur dan komposisi dari dewan komisaris, tetapi juga dari subkomite dewan komisaris di mana banyak proses dan keputusan penting dilakukan dan diawasi (Cotter dan Silvester dikutip Li, *et al.*, 2008). Pengawasan ini dilakukan oleh komite yang disebut komite audit. Menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Suatu komite audit terdiri dari mayoritas komisaris independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan untuk memberikan suatu penilaian yang lebih akurat dari keputusan dan kinerja manajemen puncak (Cerbioni dan Parbonetti, 2007). Menurut DeZoort; Wolnizer (dikutip Barako, 2007), dewan biasanya mendelegasikan tanggung jawab untuk pengawasan pelaporan keuangan kepada komite audit untuk meningkatkan luas relevansi dan reliabilitas dari laporan tahunan. Jadi, komite audit mempunyai peran yang besar di dalam perusahaan untuk mencapai *good corporate governance*.

Menurut Li, *et al.* (2008), peran dari komite audit telah berkembang bertahun-tahun untuk menghadapi tantangan akan perubahan lingkungan bisnis,

sosial dan ekonomi. Laporan Smith (dalam Li, *et al.*, 2008) di Inggris, mengidentifikasi peran komite audit seperti memastikan bahwa kepentingan dari pemegang saham dilindungi dengan baik dalam hubungannya dengan pelaporan keuangan (*financial reporting*) dan pengendalian internal (*internal control*). Laporan Smith (dalam Li, *et al.*, 2008) merekomendasikan komite audit untuk mereview isu-isu dan penilaian pelaporan keuangan yang signifikan yang dibuat dalam hubungan dengan persiapan laporan keuangan perusahaan, laporan interim, pengumuman pendahuluan dan laporan formal yang terkait, seperti review operasi dan keuangan dan penyiaran informasi yang sensitif terhadap harga.

Menurut Ho dan Wong (dalam Barako, 2007), penelitian sebelumnya menyediakan bukti hubungan positif antara keberadaan komite audit dan praktik pengungkapan perusahaan. Penelitian yang sama juga dilakukan McMullen (dikutip Barako, 2007), yang melaporkan bahwa keberadaan komite audit yang dihubungkan dengan pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, seperti mengurangi timbulnya kesalahan (*error*), ketidakberesan dan indikator pelaporan yang tidak dapat dipercaya lainnya. Komite audit dapat menjadi suatu mekanisme pengawasan yang memperbaiki kualitas arus informasi antara pemilik perusahaan (pemegang saham dan pemegang saham potensial) dan manajer, terutama dalam lingkungan pelaporan keuangan dimana mempunyai tingkat informasi yang berlainan (Barako, 2007). Li, *et al.* (2008) menyatakan bahwa perusahaan dengan ukuran komite audit yang lebih besar cenderung menyediakan pengungkapan IC lebih besar di dalam laporan tahunannya. Jadi, diharapkan komite audit yang lebih

besar memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengatur praktik pengungkapan IC. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.

Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit (MAC) Terhadap *Intellectual Capital Disclosure*

Menurut Li, *et al.* (2008), komite audit yang efektif harus meningkatkan pengendalian internal dan bertindak sebagai suatu alat untuk mengurangi biaya agensi (Ho dan Wong) dan sebagai suatu alat pengawasan yang sangat kuat untuk meningkatkan pengungkapan IC yang relevan nilai. Komite audit yang tidak aktif tidak mungkin mengawasi manajemen secara efektif dan waktu pertemuan yang cukup harus disediakan untuk pertimbangan isu-isu yang utama (Olson dalam Li, *et al.* (2008). Oleh karena itu, komite audit harus aktif mengawasi manajemen dan mengadakan pertemuan secara rutin. Menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004, komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Price Waterhouse (dalam Li, *et al.*, 2008) merekomendasikan bahwa komite audit harus mengadakan sedikitnya tiga atau empat pertemuan setiap tahun dan pertemuan khusus ketika diperlukan. Dengan demikian pertemuan komite audit yang lebih sering akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengatur praktik IC *disclosure*. Li, *et al.* (2008) membuktikan bahwa ada hubungan positif

antara frekuensi pertemuan komite audit dan tingkat pengungkapan IC. Berdasarkan uraian di atas, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.

Pengaruh Auditor eksternal (AUD) Terhadap *Intellectual Capital Disclosure*

Sekarang ini, perusahaan yang listing di bursa wajib menerbitkan laporan tahunan. Hal ini sesuai peraturan baru yang dikeluarkan Bapepam nomor: KEP-134/BL/2006 mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Dimana dalam laporan tahunan tersebut diwajibkan memuat laporan tentang tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Auditor ini berperan mengaudit laporan keuangan para emiten di bursa. Tujuannya adalah untuk menjamin kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Kualitas audit yang dilakukan oleh auditor mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan informasi di dalam laporan keuangan. Kualitas audit ini erat kaitannya dengan reputasi auditor (KAP). KAP yang besar memiliki insentif yang lebih besar untuk mengeluarkan laporan auditor independen yang akurat karena KAP tersebut memiliki reputasi yang lebih baik.

Menurut Barako (2007), meskipun seluruhnya adalah tanggung jawab manajemen untuk menyiapkan laporan tahunan, sebuah perusahaan audit eksternal dapat mempengaruhi secara signifikan jumlah informasi yang diungkapkan dalam rangkaian tugasnya yang normal. DeAngelo (dikutip Barako, 2007) membuktikan bahwa perusahaan audit yang besar menginvestasikan lebih banyak untuk

memelihara reputasi sebagai penyedia audit berkualitas daripada perusahaan yang lebih kecil. Dinyatakan juga bahwa perusahaan audit yang besar mempunyai banyak klien dan oleh karena itu, nampaknya akan kurang bergantung pada klien individu yang mungkin berkompromi tentang kualitas pekerjaannya dengan cukup besar daripada perusahaan audit kecil (Owusu-Ansah dalam Barako, 2007).

Independensi dimiliki oleh KAP yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi laporan keuangan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pemakai eksternal terhadap laporan, karena nilai mereka sebagai auditor, pada sebagian, tergantung pada bagaimana pemakai laporan tahunan memahami laporan auditor (DeAngelo dalam Barako, 2007). Menurut Barako (2007), sejumlah studi sebelumnya telah mendokumentasikan hubungan antara ukuran perusahaan audit dan pengungkapan perusahaan, misalnya Ahmed dan Nicholls; DeAngelo; McNally, *et al.*; Singhvi dan Desai. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Auditor eksternal berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.

Pengaruh Kepemilikan Manajemen (MAN_OWN) Terhadap *Intellectual Capital Disclosure*

Kepemilikan manajemen ditunjukkan dengan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh direktur. Jensen dan Meckling (1976) membuktikan bahwa pemisahan antara kepemilikan saham dan pengendalian atas perusahaan menciptakan konflik kepentingan antara para manajer dan pemegang

saham. Konflik meningkat ketika para manajer memperoleh insentif untuk meningkatkan kekayaan mereka sendiri (sebagai contoh melalui maksimalisasi bonus) atas biaya dari pemegang saham. Perilaku manipulasi yang dilakukan oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan tersebut. Memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (Jensen dan Meckling, 1976), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Sebagaimana jika proporsi kepemilikan ekuitas manajemen meningkat, maka konflik kepentingan ini akan berkurang.

Sesuai dengan teori ini, Demsetz dan Lehn; Abor dan Biekpe (dikutip Saleh, *et al.*, 2008) menemukan hubungan positif antara kinerja perusahaan dan tingkat kepemilikan manajemen di perusahaan. Pengukuran ini digunakan karena hanya manajer eksekutif yang mempunyai kekuasaan dan kontrol sebagian besar keputusan di dalam perusahaan (Saleh, *et al.*, 2008). Konsisten dengan pendapat ini, diprediksikan bahwa jika kepemilikan manajemen meningkat, manajemen akan lebih mau meningkatkan aktivitas penciptaan nilai yang membuat yang dapat meningkatkan manfaat kompetitif di masa depan. Dalam hal ini aktivitas tersebut akan meningkatkan Kinerja IC di perusahaan. Menurut Saleh, *et al.* (2008), struktur kepemilikan perusahaan seperti kepemilikan oleh manajemen, investor asing, pemerintah dan keluarga adalah penting dalam penentuan kebijakan IC dan pengawasan tindakan manajemen untuk pencapaian strategi perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.

Pengaruh Kepemilikan Institusi (INS_OWN) Terhadap *Intellectual Capital Disclosure*

Kepemilikan institusi adalah proporsi saham yang dimiliki oleh institusi. Dalam kaitan dengan kepemilikan besar, investor institusional mempunyai insentif yang kuat untuk mengawasi praktik pengungkapan perusahaan (Barako, 2007). Jadi, manajer mungkin mengungkapkan informasi secara sukarela untuk memenuhi harapan dari pemegang saham yang besar. Berdasarkan sebuah studi dari perusahaan Finlandia, Schadewitz dan Blevins (dikutip Cerbioni dan Parbonetti, 2007) melaporkan suatu hubungan yang terbalik antara konsentrasi kepemilikan institusional dan pengungkapan. Akan tetapi, Carson dan Simnett, (dikutip Barako, 2007) menemukan bahwa ada suatu hubungan positif yang signifikan antara persentase kepemilikan oleh investor institusi dan pengungkapan sukarela dari praktik tata kelola oleh perusahaan yang terdaftar di Australia.

Sementara pada penelitian lain, Bushee dan Noe (dalam Barako, 2007) mendokumentasikan suatu hubungan positif yang signifikan antara kepemilikan institusional dan praktik pengungkapan perusahaan. Menurut Tinaikar (2006), kepemilikan institusi dapat bertindak sebagai sebuah sumber penting dari mekanisme tata kelola eksternal. Untuk itu, mereka dapat memaksa manajer untuk membuat pengungkapan yang berkali-kali. El-Gazzar (dalam Cerbioni dan Parbonetti, 2007) membuktikan bahwa kepemilikan institusional yang besar dapat

menghasilkan suatu tingkat pengungkapan sukarela yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₇: Kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

Menurut Sekaran (2006), variabel adalah apa pun yang dapat membedakan dan merubah nilai. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen, variabel dependen dan variabel kontrol. Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti sedangkan variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Variabel-variabel tersebut adalah:

Variabel dependen : *Intellectual capital disclosure (ICD)*

Variabel independen : Proporsi komisaris independen

Konsentrasi saham

Ukuran komite audit

Jumlah rapat komite audit

Auditor eksternal

Kepemilikan manajemen

Kepemilikan institusi

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

3.1.2.1 *Intellectual Capital Disclosure (ICD)*

Untuk menentukan nilai ICD, maka harus diketahui nilai proksi ICDI, ICWC dan ICWC% terlebih dahulu. Setelah itu, perlu dilakukan suatu analisis faktor untuk mencari nilai proksi Total_ICD.

a. *Intellectual Capital Disclosure Index (ICDI)*

Dichotomous coding digunakan dalam penghitungan item-item ICDI, jika item diungkapkan maka dinilai 1 jika tidak maka 0. Pengkodean ini menggunakan frase. Menurut Li, *et al.* (2008), pengkodean dalam frase dan *word count* untuk menghindari masalah kalimat pengkodean dalam kaitan dengan keputusan melebihi tema yang dominan dan frase meninggalkan arti yang menyangkut kebenarannya, memungkinkan pengukuran jumlah informasi yang disediakan. Menurut Li, *et al.* (2008), pengkodean laporan tahunan ke dalam frase menyertakan proses tiga tahap:

1. Pemilihan kalimat yang mengandung informasi IC.
2. Pemecahan kalimat ke dalam frase dan pilih hanya yang berhubungan dengan IC.
3. Pengkodean frase ke dalam masing-masing item relevan dalam instrumen penelitian.

Jika sebuah frase berhubungan dengan lebih dari satu item dalam *checklist* dan tidak dapat dipecah, ini kemudian dikodekan dalam semua item yang berhubungan dan *word count* didistribusikan merata untuk

semua item yang dikodekan. ICDI untuk masing-masing perusahaan dihitung berdasarkan pada formula penghitungan indeks pengungkapan yang digunakan Haniffa dan Cooke (dalam Li, *et al.*, 2008), yaitu sebagai berikut:

Rumus:

$$ICDI_j = \frac{\sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}}{n_j} \dots\dots\dots (3.1)$$

Keterangan:

ICDI_j = Indeks pengungkapan IC

N_j = Jumlah item untuk j tahun perusahaan, *n_j* = 183
(yaitu 61 item dalam 3 format)

X_{ij} = 1 jika item *ith* diungkapkan, 0 jika item *ith* tidak diungkapkan, jadi, $0 \leq ICDI_j \leq 1$.

b. *Intellectual Capital Word Count (ICWC)*

ICWC digunakan untuk mengumpulkan volume dari kandungan IC dan untuk mengatasi sebagian masalah dari penggunaan suatu *index score*. ICWC ini merupakan bentuk pengukuran kata. Kata adalah unit pengukuran yang paling kecil untuk analisis dan dapat diharapkan untuk menyediakan ketahanan yang maksimum terhadap studi di dalam menaksir kuantitas pengungkapan (Zeghal dan Ahmed dikutip Li, *et al.*, 2008). ICWC dihitung dengan cara menjumlahkan kata-kata yang diungkapkan yang berkaitan dengan IC dalam laporan tahunan kemudian hasilnya dikalikan dengan *logaritma natural* (Ln).

c. *Intellectual Capital Word Count%* (ICWC%)

Penghitungan kata sebagai suatu persentase dari jumlah penghitungan kata laporan tahunan (ICWC%) untuk mengindikasikan fokus pengungkapan di dalam laporan tahunan. ICWC% dihitung dengan cara menjumlahkan kata-kata yang diungkapkan yang berkaitan dengan IC kemudian dibagi dengan jumlah seluruh kata dalam laporan tahunan.

d. Total *intellectual capital disclosure* (Total_ICD)

Merupakan keseluruhan dari *intellectual capital disclosure*. Total_ICD dihitung dengan cara meringkas antara proksi ICDI, ICWC dan ICWC% dengan menggunakan analisis faktor. Jika nilai *kaiser-meyer-olkin measure of sampling adequacy* >0,50 maka analisis faktor dapat dilakukan (Ghozali, 2006).

Li, *et al.* (2008) mengklasifikasikan *intellectual capital* ke dalam tiga kategori. Kategori tersebut adalah *human capital*, *structural capital* dan *relational capital*. Pengklasifikasian tersebut digunakan untuk pengukuran variabel dependen pada penelitian ini dan akan dijelaskan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Klasifikasi *intellectual capital* (IC) Menurut Li, *et al.* (2008)

No.	<i>Human Capital</i>	No.	<i>Structural Capital</i>	No.	<i>Relational Capital</i>
1.	Jumlah karyawan	1.	Kekayaan intelektual	1.	Pelanggan
2.	Umur karyawan	2.	Proses	2.	Keberadaan pasar
3.	Keanekaragaman karyawan	3.	Filosofi manajemen	3.	Hubungan pelanggan
4.	Persamaan karyawan	4.	Budaya perusahaan	4.	Akuisisi pelanggan

Lanjutan dari halaman 51

No.	<i>Human Capital</i>	No.	<i>Structural Capital</i>	No.	<i>Relational Capital</i>
5.	Hubungan karyawan	5.	Fleksibilitas organisasi	5.	Retensi pelanggan
6.	Pendidikan karyawan	6.	Struktur organisasi	6.	CTE (<i>customer training and education</i>)
7.	Ketrampilan atau kecakapan	7.	Pembelajaran organisasi	7.	Keikutsertaan pelanggan
8.	Kompetensi karyawan berhubungan kerja	8.	Penelitian dan pengembangan (R&D)	8.	<i>Image</i> atau reputasi perusahaan
9.	Pengetahuan karyawan berhubungan kerja	9.	Inovasi	9.	Penghargaan perusahaan
10.	Sikap atau perilaku karyawan	10.	Teknologi	10.	Hubungan publik
11.	Komitmen karyawan	11.	Perjanjian keuangan	11.	Difusi dan jaringan
12.	Motivasi karyawan	12.	Fungsi pendukung pelanggan	12.	Merk
13.	Produktivitas karyawan	13.	Infrastruktur berbasis pengetahuan	13.	Saluran distribusi
14.	Pelatihan karyawan	14.	Manajemen dan peningkatan mutu	14.	Hubungan dengan pemasok
15.	Kualifikasi kejuruan	15.	Akreditasi (sertifikat)	15.	Kolaborasi bisnis
16.	Pengembangan karyawan	16.	Kapabilitas atau infrastruktur keseluruhan	16.	Perjanjian bisnis
17.	Fleksibilitas karyawan	17.	Jaringan	17.	Kontrak favorit
18.	Semangat kewirausahaan	18.	Jaringan distribusi	18.	Kolaborasi penelitian
19.	Kapabilitas karyawan			19.	Pemasaran
20.	Kerjasama karyawan			20.	Hubungan dengan <i>stakeholder</i>
21.	Keikutsertaan karyawan dalam masyarakat			21.	Kepemimpinan pasar
22.	Fitur lain karyawan				

Sumber: Li, *et al.* (2008).

3.1.2.2 Proporsi Komisaris Independen (INED)

The board of directors adalah suatu mekanisme pengendalian internal yang diharapkan untuk mengambil keputusan-keputusan atas nama pemegang saham dan untuk memastikan bahwa perilaku manajemen adalah konsisten dengan kepentingan pemilik (Li, *et al.*, 2008). *The board of directors* ini jika diartikan dalam struktur *corporate governance two tier system* di Indonesia adalah komisaris. Variabel ini diukur dengan cara menghitung jumlah komisaris independen dibagi jumlah dewan komisaris.

Rumus:

$$\text{INED (\%)} = \text{Komisaris independen} \div \text{Jumlah total komisaris} \dots\dots\dots (3.2)$$

Keterangan:

$$\text{INED (\%)} = \text{Proporsi komisaris independen}$$

3.1.2.3 Konsentrasi saham (SCON)

Struktur kepemilikan akan mempengaruhi tingkat pengawasan dan tingkat pengungkapan sukarela (Eng dan Mak dalam Li, *et al.*, 2008).

Struktur kepemilikan dihitung berdasarkan jumlah kumulatif kepemilikan pemegang saham (*shareholders*) $\geq 5\%$. Rumus:

$$\text{SCON (\%)} = (\sum \text{kepemilikan oleh } \textit{shareholders} \geq 5\%) \dots\dots\dots (3.3)$$

Keterangan:

$$\text{SCON (\%)} = \text{Jumlah kumulatif kepemilikan saham minimal 5\%}.$$

3.1.2.4 Ukuran Komite Audit (SAC)

Pemantauan dewan adalah suatu fungsi yang tidak hanya dari struktur dan komposisi dari dewan, tetapi juga dari subkomite dewan di mana banyak proses-proses dan keputusan penting dipantau dan diambil (Cotter dan Silvester dikutip Li, *et al.*, 2008). Komite audit ini mempunyai peran yang penting. Variabel Ukuran komite audit (SAC) diukur dengan menghitung jumlah dewan komisaris yang ada pada komite audit.

3.1.2.5 Jumlah Rapat Komite audit (MAC)

Komite audit yang efektif akan meningkatkan pengendalian internal dan bertindak sebagai suatu makna dari pengurangan biaya agensi (Ho dan Wong dalam Li, *et al.*, 2008), dan sebagai suatu alat pemantauan yang kuat untuk meningkatkan nilai relevan atas IC *disclosure* (Li, *et al.*, 2008). Variabel ini diukur dengan cara menghitung jumlah rapat komite audit yang diadakan pada periode laporan tahunan.

3.1.2.6 Auditor Eksternal (AUD)

Kualitas audit yang dilakukan oleh auditor mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan informasi di dalam laporan keuangan. Kualitas audit ini erat kaitannya dengan reputasi auditor (KAP). Menurut Zubaidah dan Zulfikar (2005), KAP yang besar memiliki insentif yang lebih besar untuk mengeluarkan laporan auditor independen yang akurat karena KAP tersebut memiliki reputasi yang lebih baik. Variabel ini diukur dengan menggunakan *dummy*. Jika perusahaan diaudit

oleh KAP yang berafiliasi dengan *Big-Four*, maka dinilai 1, jika tidak berarti 0 (Barako, 2007). KAP *Big-Four* yang digunakan sesuai dengan dalam penelitian ini adalah:

- a. Price Waterhouse Coopers, dengan partnernya di Indonesia KAP Drs. Hadi Sutanto dan Rekan.
- b. Ernst & Young, dengan partnernya di Indonesia KAP Hanadi, Sarwoko dan Sandjaja.
- c. Delloitte and Touche Tohmatsu, dengan partnernya di Indonesia KAP Hans, Tuanakotta dan Mustofa.
- d. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) International, dengan partnernya di Indonesia KAP Siddharta, Siddharta dan Harsono.

3.1.2.7 Kepemilikan Manajemen (MAN_OWN)

Kepemilikan manajemen ditunjukkan dengan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh manajer eksekutif. Pengukuran ini digunakan karena manajer eksekutif yang mempunyai kekuasaan dan kontrol sebagian besar keputusan di dalam perusahaan (Saleh, *et al.*, 2008). Jensen dan Meckling (1976) membuktikan bahwa pemisahan antara kepemilikan saham dan pengendalian atas perusahaan menciptakan konflik kepentingan antara para manajer dan pemegang saham. Kepemilikan manajemen dihitung dengan menjumlahkan seluruh saham yang dimiliki oleh dewan direksi perusahaan.

3.1.2.8 Kepemilikan Institusi (INS_OWN)

Kepemilikan institusi adalah proporsi saham yang dimiliki oleh institusi pada akhir tahun yang diukur dalam presentase. Kepemilikan institusi dihitung dengan menjumlahkan seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh institusi atas perusahaan.

3.1.2.9 Usia Listing (AGE)

Menurut Li, *et al.* (2008), lamanya periode perusahaan yang telah terdaftar pada pasar modal mungkin menjadi relevan dalam menjelaskan variasi pengungkapan. Perusahaan yang telah lama terdaftar di bursa justru menyajikan lebih sedikit pengungkapan, sesuai dengan penelitian Li, *et al.* (2008). Usia listing diukur dengan menghitung selisih waktu (hari) antara saat pertama kali perusahaan mencatatkan di pasar modal dengan saat berakhirnya periode laporan tahunan, kemudian hasilnya dikalikan dengan *logaritma natural* (Ln). Penentuan usia listing dijelaskan dalam rumus di bawah ini.

$$\text{AGE} = \text{Ln} (\text{Tanggal berakhirnya periode laporan tahunan} - \text{tanggal pertama kali terdaftar di bursa}) \dots \dots \dots (3.4)$$

Keterangan:

$$\text{AGE} = \text{Usia listing}$$

3.1.2.10 Profitabilitas (ROA)

ROA mungkin sebagai hasil dari investasi secara terus-menerus dalam IC dan perusahaan mungkin menggunakan pengungkapan yang lebih tinggi dari informasi seperti itu untuk memberi sinyal berarti atas keputusannya dalam

investasi IC untuk pertumbuhan jangka panjang dalam nilai perusahaan (Li, *et al.* (2008). Hasil penelitian Li, *et al.* (2008) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap IC *disclosure*. ROA dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \text{Laba bersih tahun } t \text{ dibagi total aset tahun } t \dots\dots\dots (3.5)$$

3.1.2.11 Ukuran Perusahaan (SALES)

Perusahaan yang besar lebih tampak dan kemungkinan besar memenuhi permintaan investor atas informasi (Li, *et al.*, 2008). Ukuran perusahaan diukur berdasarkan nilai penjualan (bersih) perusahaan kemudian hasilnya dikalikan dengan *logaritma natural* (Ln). Variabel-variabel penelitian di atas dapat dirangkum pada dalam tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Ringkasan Variabel Penelitian

No.	Variabel	Proksi	Simbol	Definisi
1.	Dependen: <i>intellectual capital disclosure</i>	a. <i>Intellectual capital disclosure index</i>	ICDI	Jumlah item IC yang diungkapkan dibagi dengan 183
		b. <i>Intellectual capital word count</i>	ICWC	Jumlah kata-kata yang berkaitan dengan IC yang diungkapkan dalam laporan tahunan
		c. <i>Intellectual capital word count%</i>	ICWC%	Jumlah kata-kata yang berkaitan dengan IC dibagi dengan jumlah seluruh kata dalam laporan tahunan
		d. Total <i>intellectual capital disclosure</i>	Total_ICD	Peringkasan (<i>summarization</i>) dari ICDI, ICWC dan ICWC% dengan menggunakan analisis faktor

Lanjutan dari halaman 57

No.	Variabel	Proksi	Simbol	Definisi
2.	Independen: a. Proporsi komisaris independen		INED	Jumlah komisaris independen dibagi Jumlah komisaris
	b. Konsentrasi saham		SCON	Kepemilikan kumulatif dari seluruh <i>shareholders</i> dengan kepemilikan $\geq 5\%$
	c. Ukuran komite audit		SAC	Jumlah dewan komisaris yang ada pada komite audit
	d. Jumlah rapat komite audit		MAC	Jumlah rapat komite audit yang diadakan pada tahun t
	e. Auditor eksternal		AUD	Variabel <i>dummy</i> dengan nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan <i>Big-Four</i> dan 0 jika tidak berafiliasi
	f. Kepemilikan Manajemen		MAN_OWN	Jumlah kepemilikan saham oleh direksi
	g. Kepemilikan Institusi		INS_OWN	Jumlah total kepemilikan saham oleh institusi
3.	Kontrol: a. Usia listing		AGE	Jumlah hari lama terdaftar di bursa dengan skala 365 hari per tahun
	b. Profitabilitas	<i>Return On Assets</i>	ROA	Laba bersih tahun t dibagi total aset pada tahun t
	c. Ukuran perusahaan	Penjualan	SALES	Pendapatan penjualan pada tahun t

Sumber: Data sekunder yang diolah (2010).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008. Jumlah populasi tersebut sebanyak 401 perusahaan (IDX, 2008). Pemilihan objek penelitian pada perusahaan yang terdaftar di BEI dikarenakan perusahaan tersebut dikenakan aturan Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur tentang struktur dan organ perseroan terbatas maupun praktik tata kelola perusahaan dan Keputusan Ketua Bapepam-LK nomor: Kep-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Dalam adanya aturan tersebut, diharapkan perusahaan yang diteliti tentunya akan memiliki data yang lengkap tentang struktur *corporate governance*-nya. Pemilihan populasi perusahaan pada seluruh jenis industri yang terdapat di BEI dikarenakan untuk mengetahui variasi tingkat IC *disclosure* seluruh perusahaan di BEI.

Penentuan data tahun pengamatan 2008 adalah untuk mengetahui tingkat IC *disclosure* yang terbaru. Besarnya sampel yang digunakan adalah 36 perusahaan. Hair, *et al.* (1998) menyebutkan bahwa ada sebuah aturan umum dalam ukuran sampel bahwa perlu ada lima observasi untuk setiap variabel independen dan jika dalam kasus dimana sampel tidak tersedia untuk kriteria ini maka peneliti harus mem-*valid*-kan kemampuan generalisasi dari hasil. Jumlah variabel independen dalam penelitian ini adalah tujuh sehingga jumlah sampel sebanyak 36 perusahaan sudah memenuhi jumlah minimum sampel sesuai aturan Hair, *et al.* (1998). Dasar penentuan sampel adalah sampel yang memenuhi kelengkapan data. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Ini adalah metode pengumpulan sampel yang berdasarkan kriteria-

kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun syarat sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008.
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) tahun 2008, yang memuat data yang dibutuhkan secara lengkap, yaitu tentang proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan saham sebesar $\geq 5\%$, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit selama tahun 2008, auditor eksternal, jumlah kepemilikan saham oleh manajemen serta jumlah kepemilikan saham oleh institusi tertentu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan bertipe *cross-sectional*, yaitu laporan tahunan (*annual report*) untuk tahun buku 2008. Data *cross-sectional* adalah data tentang satu atau lebih variabel yang dikumpulkan pada satu titik pada waktu itu juga (Gujarati, 2006). Laporan tahunan dipilih karena dua alasan (Lang dan Lundholm dikutip Bozzolan, et al., 2003). Pertama, mempertimbangkan suatu sumber informasi perusahaan yang penting dengan pemakai eksternal seperti *stakeholder*. Kedua, tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan dihubungkan secara positif dengan jumlah informasi perusahaan yang dikomunikasikan kepada pasar dan *stakeholder* dengan menggunakan media lainnya. Adapun data penelitian ini didapatkan dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode dokumentasi dan metode *content analysis*. Metode dokumentasi digunakan dengan cara mengumpulkan dan meringkas data tentang variabel independen dan kontrol yang terdapat pada laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008. Adapun metode *content analysis* akan dijelaskan di bawah ini.

3.4.1 Content Analysis

Metode *content analysis* digunakan untuk mengumpulkan dan mengkaji data tentang variabel dependen yang terdapat pada laporan tahunan. *Content analysis* adalah suatu teknik pengumpulan data yang menyediakan pengkodean informasi kualitatif dan kuantitatif ke dalam kategori-kategori yang sudah dikenal dalam rangka untuk memperoleh pola dalam penyajian dan pelaporan informasi (Guthrie, *et al.*, 2004). Menurut Krippendorff; Weber (dalam Bozzolan, *et al.*, 2003), penerapan metode *content analysis* terdiri dari tahap-tahap yang berbeda, yaitu:

1. Pemilihan kerangka kerja (*framework*) yang digunakan untuk mengklasifikasikan informasi
2. Mendefinisikan unit pencatatan.
3. Pengkodean atau memberi kode
4. Penilaian tingkat reliabilitas yang dicapai.

Untuk mengukur reliabilitas dari hasil *content analysis* maka digunakan uji statistik *cronbach alpha* (α). Uji *cronbach alpha* (α) ini akan dijelaskan lebih

lanjut pada subbab 3.5.3.

3.5 Metode Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda seperti yang digunakan dalam penelitian Li, *et al.* (2008). Menurut Hair, *et al.* (1998), analisis regresi berganda merupakan suatu teknik statistika umum yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Pada penelitian ini hanya proksi total *intellectual capital disclosure* (Total_ICD) yang digunakan untuk menguji hubungan antara *intellectual capital disclosure* dan berbagai variabel *corporate governance* dan kontrol. Proksi tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan pengujian hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dikarenakan proksi total *intellectual capital disclosure* (Total_ICD) karena merupakan variabel ringkasan (*summarization*) dari ketiga proksi yang lainnya, yaitu ICDI, ICWC dan ICWC%. Sebelum dilakukan analisis regresi berganda, perlu dilakukan analisis faktor untuk menentukan proksi yaitu total *intellectual capital disclosure* (Total_ICD). Kemudian dilakukan uji reliabilitas atas variabel dependen dikarenakan seluruh variabel dependennya merupakan variabel konstruk. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis tersebut adalah sebagai berikut.

3.5.1 Analisis Faktor (*Factor Analysis*)

Menurut Ghazali (2006), analisis faktor merupakan analisis yang bertujuan untuk menemukan suatu cara meringkas (*summarize*) informasi yang ada dalam

variabel asli (awal) menjadi satu set dimensi baru atau *variate (factor)*. Analisis faktor dilakukan dengan cara menentukan struktur lewat *data summarization* atau lewat *data reduction* (pengurangan data). Salah satu cara menentukan dapat atau tidaknya dilakukan suatu analisis faktor adalah dengan melihat matrik korelasi secara keseluruhan. Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah bahwa data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*) (Ghozali, 2006). Untuk mengetahui korelasi antar variabel dapat menggunakan dua cara, yaitu:

1. Uji *Bartlett test of sphericity*

Menurut Ghozali (2006), uji ini merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Jika hasilnya signifikan ($<0,05$) berarti matrik korelasi memiliki korelasi signifikan dengan sejumlah variabel.

2. Uji *Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)*

Uji ini digunakan juga untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2006). Nilai KMO bervariasi antara 0 sampai dengan 1. Agar dapat dilakukan analisis faktor maka nilai KMO yang dikehendaki harus di atas 0,50 ($>0,50$).

3.5.2 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2006), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), deviasi standar (*standard deviation*), varian (*variance*), maksimum, minimum, *sum*, *range*,

kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi). Adapun statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan deviasi standar dari masing-masing variabel penelitian.

3.5.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2006). Ghozali (2006) juga menyatakan bahwa konstruk yang sering disebut variabel *latent* atau *un-observed* adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dibentuk melalui dimensi-dimensi yang diamati atau indikator-indikator yang diamati. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Hasil *content analysis* harus diuji tingkat reliabilitasnya (Krippendorff; Weber dalam Bozzolan, *et al.*, 2003). Menurut Ghozali (2006), pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dengan dua cara yaitu:

1. *Repeated measure* atau pengukuran ulang.

Di sini seseorang akan disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.

2. *One shot* atau pengukuran sekali saja.

Di sini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Menurut Ghozali (2006), SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur

reliabilitas dengan uji statistik *cronbach alpha* (α). Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* (α) >0,60 (Nunnally dalam Ghozali, 2006).

3.5.4 Uji Asumsi Klasik

3.5.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2006). Seperti diketahui bahwa uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik

Analisis grafik dilakukan dengan menggunakan melihat grafik histogram dan grafik normal plot (*normal probability plot of regression standardized residual*). Data dikatakan berdistribusi normal apabila data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, dan sebaliknya.

Selain itu, dalam penelitian ini, untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak maka dilakukan uji statistik non-parametrik *kolmogorov-smirnov* (Uji K-S). Uji K-S dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi atau *asympt. Sig (2-tailed)*. Sebelumnya perlu ditentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian, yaitu:

Hipotesis Ho : data terdistribusi secara normal

Hipotesis H_1 : data tidak terdistribusi secara normal

Apabila nilai probabilitas signifikansi $>0,05$, maka data terdistribusi secara normal. Apabila nilai probabilitas signifikansi $<0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal.

3.5.4.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2006). Cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dalam model regresi antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisis matrik korelasi antar variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (di atas 0,95) maka muncul indikasi adanya multikolonieritas.
2. Melihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $<0,10$ atau sama dengan nilai VIF >10 . Jika terdapat nilai *tolerance* $<0,10$ dan nilai VIF >10 maka muncul indikasi adanya multikolonieritas.

3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2006). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara yang dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen), yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*. Dasar analisis adalah apabila titik-titiknya membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, menyebar kemudian menyempit) maka diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu maka model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas.

3.5.5 Model Regresi

Persamaan regresi berganda tujuh prediktor dalam penelitian ini sebagai berikut (Ghozali, 2006):

$$\begin{aligned} \text{Total_ICD} = & \beta_0 + \beta_1 \text{INED}_i + \beta_2 \text{SCON}_i + \beta_3 \text{SAC}_i + \beta_4 \text{MAC}_i + \beta_5 \text{AUD} \\ & + \beta_6 \text{MAN_OWN}_i + \beta_7 \text{INS_OWN}_i + \beta_8 \text{LnAGE}_i + \beta_9 \text{ROA}_i \\ & + \beta_{10} \text{LnSALES}_i + \varepsilon_i \quad \dots\dots\dots (3.7). \end{aligned}$$

Keterangan:

Total_ICD	=	Total <i>intellectual capital disclosure</i>
β_0	=	Koefisien arah regresi (konstanta)
β_1	=	Koefisien arah regresi variabel proporsi komisaris independen
β_2	=	Koefisien arah regresi variabel konsentrasi saham
β_3	=	Koefisien arah regresi variabel ukuran komite audit
β_4	=	Koefisien arah regresi variabel jumlah rapat komite audit
β_5	=	Koefisien arah regresi variabel auditor eksternal
β_6	=	Koefisien arah regresi variabel kepemilikan manajemen
β_7	=	Koefisien arah regresi variabel kepemilikan institusi
β_8	=	Koefisien arah regresi variabel usia listing
β_9	=	Koefisien arah regresi variabel ROA
β_{10}	=	Koefisien arah regresi variabel sales
INED	=	Proporsi komisaris independen
SCON	=	Jumlah kepemilikan secara kumulatif dari <i>shareholder</i> signifikan ($\geq 5\%$)
SAC	=	Ukuran komite audit
MAC	=	Jumlah rapat komite audit
AUD	=	Auditor eksternal
MAN_OWN	=	Kepemilikan manajemen
INS_OWN	=	Kepemilikan institusi

LnAGE	=	Log natural dari lamanya listing di bursa
ROA	=	<i>Return on Assets</i>
LnSALES	=	Log natural dari penjualan
ε_i	=	<i>Error time</i>
i	=	Tahun ke-i

3.5.6 Analisis Regresi

Menurut Ghozali (2006), ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t.

3.5.6.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) adalah uji statistik untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai R^2 adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Adapun pedoman untuk melihat hal tersebut adalah dengan melihat koefisien *Adjusted R Square X 100%*.

3.5.6.2 Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Pedoman untuk menerima atau menolak hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan F hitung dengan F tabel

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima atau H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

- b. Melihat *probabilities values*

Jika *probabilities value* (p) $> 0,05$ maka H_0 diterima atau H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Jika *probabilities value* (p) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

3.5.6.3 Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yang dapat dipilih yaitu:

- a. Membandingkan t hitung dengan t tabel

Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima atau H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

b. Melihat *probabilities values*

Jika *probabilities value* (p) $> 0,05$ maka H_0 diterima atau H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Jika *probabilities value* (p) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.